

Referendum Inggris di Kepulauan Falkland / Malvinas dan Dampaknya Terhadap Argentina



Skripsi

*Disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan
Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin*

oleh:

EFRIANTO TRISNO PANGGALO

E 131 09 269

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2013**

ABSTRAK

Efrianto Trisno Panggalo, E 131 09 269, “*Referendum Inggris di Kepulauan Falkland / Malvinas dan Dampaknya Terhadap Argentina*”, di bawah bimbingan Muhammad Nasir Badu selaku pembimbing I dan Nur Isdah selaku pembimbing II, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kepentingan nasional Inggris dalam referendum di kepulauan Falkland/Malvinas. Dan mengetahui dan menjelaskan bagaimana dampak referendum kepulauan Falkland/Malvinas tersebut terhadap klaim kedaulatan Argentina pada kepulauan Falkland/Malvinas

Tipe penelitian yang penulis gunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah tipe penelitian deskriptif-analitik. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi pustaka. Adapun untuk menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan Inggris dalam mengadakan referendum di kepulauan Falkland/Malvinas adalah untuk menjaga kedaulatan wilayahnya dan mengamankan sumber daya alam yang terdapat di sekitar kepulauan Falkland/Malvinas. Inggris juga berkepentingan untuk memberikan dan melindungi hak-hak rakyat atau penduduk yang berada dalam wilayah kedaulatannya. Inggris menganggap bahwa rakyat Falkland/Malvinas memiliki hak yang sama seperti yang dimiliki warga Inggris lainnya oleh sebab itu walaupun diprotes oleh beberapa negara wilayah Amerika Selatan dan Afrika, Inggris tetap melakukan proses referendum karena penduduk Falkland/Malvinas meminta Inggris untuk mengadakan referendum politik di wilayah tersebut. Dampak Referendum Inggris di kepulauan Falkland/Malvinas terhadap Argentina adalah Argentina menolak mengakui referendum yang diadakan oleh pemerintah Inggris dan memilih untuk tetap mengadakan jalur perundingan dengan pemerintah Inggris untuk menyelesaikan sengketa wilayah antara kedua negara. Argentina juga telah mengirimkan surat protes terhadap komite dekolonisasi PBB dan menyatakan bahwa pemerintah Inggris masih berusaha untuk melakukan kegiatan kolonialisme dengan menolak melepas kepulauan Falkland/Malvinas ke pemerintah Argentina. Argentina juga berusaha untuk meminta dukungan negara-negara anggota MERCOSUR dan beberapa forum kerjasama internasional lainnya untuk mendukung Argentina dalam mendapatkan kedaulatan atas kepulauan Falkland/Malvinas.

ABSTRACT

Efrianto Trisno Panggalo, E 131 09 269, “*British referendum on the Falkland/Malvinas Islands and Its Impact on Argentina*” under the guidance of Muhammad Nasir Badu as Supervisor I and Nur Isdah as Supervisor II, Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This research aims to identify and explain how British national interest in the referendum on the Falkland Islands / Malvinas. And to identify and explain how the impact of the Falklands/Malvinas referendum against Argentina’s sovereignty claim over the Falklands/ Malvinas Islands.

The type of research that the author uses to achieve the objectives is descriptive and analytic research. The data collection technique used by the author is library research. As for analyzing data, the author uses qualitative analysis technique.

The results of this research indicate that British interest in holding a referendum on the Falkland/Malvinas Islands is to safeguard its territory and securing natural resources found around the Falkland/Malvinas Islands. British was also concerned to provide and protect the rights of the people or the population residing in its territory. British considers that the people of the Falkland / Malvinas have the same rights as other British citizens held so despite protests by some countries of South America and Africa region, British remains holding a referendum process because the residents of Falkland/Malvinas ask Britain to hold a referendum. The Impact of British referendum on the Falkland/Malvinas Islands to Argentina is Argentina refused to recognize the referendum held by the British government and choose to keep track hold talks with the British government to settle the territorial dispute between the two countries. Argentina has also sent a letter of protest to the UN decolonization committee and stated that the British government is still trying to do the activities renounce colonialism with the Falkland/Malvinas Islands to the Argentine government. Argentina also sought to enlist the support MERCOSUR member countries and some other forums of international cooperation to support Argentina in getting sovereignty over the Falkland/Malvinas Islands

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dan tempat penulis berkeluh kesah sepanjang penyusunan skripsi ini. Penyertaan Yesus Kristus selalu dirasakan penulis di sepanjang hidup penulis baik dalam keadaan suka dan duka, terlebih dalam penyusunan skripsi ini. Penulis selalu bersyukur karena, ***Tak berkesudahan kasih setia TUHAN, tak habis-habisnya rahmat-Nya (Ratapan 3 : 22-23)***

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Dr. Muhammad Nasir Badu** yang telah bersedia menjadi pembimbing I penulis dan **Ibu Nur Isdah, S.IP, MA** yang telah bersedia menjadi pembimbing II penulis. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. **Bapak Dr. H. Adi Suryadi. B. MA** selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional.
3. Terima kasih kepada dosen-dosen yang dengan ikhlas membagi ilmunya, antara lain: **Bapak Prof. Mappa, Pak Aspi, Ibu Puspa, Pak Bur, Pak Ishaq, Pak Patrice, Pak Husein, Pak Munjin, Pak Darwis, dan Kak Gego**. Terima kasih atas ilmu yang telah bapak dan ibu berikan kepada penulis selama penulis berada di Universitas Hasanuddin.

4. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang dengan sabar mendoakan dan membimbing penulis sejak saya dilahirkan hingga saat ini kasih kedua orang tua kepada saya tidak pernah berubah. Ayahanda **Daniel Belo** terima kasih banyak atas kepercayaan dan wejangan-wejangan yang papa' berikan kepada saya. Maaf sampai saat ini saya belum mampu membahagiakan papa'. Ibunda **Leberina Limbong** terimah kasih banyak telah melahirkan saya kedunia terima kasih banyak atas cinta kasihmu kepada saya, terima kasih buat doamu disetiap malam kepada kami anak-anakmu
5. Terima kasih kepada adek-adekku tersayang yang selalu memperhatikan penulis dalam keseharian penulis, **Eunike Vivi Panggalo**, yang sedang berkuliah di UNSRAT semangat dalam menjalani kuliah dek walaupun kau berpisah jauh dari mama' dan papa' di kampung. **Lilis Novia Panggalo**, semangat belajarnya dalam menghadapi UAN dek, semoga kau LULUS dan dapat melanjutkan kuliah di jurusan yang sesuai dengan keinginanmu. **Anggreni Rarru' Panggalo**, tetap giat belajar adekku, sekarang kau sudah kelas 1 SMA jangan malas-malas belajarnya.
6. Terima kasih kepada Opa **Ranoang Pai'pinan** dan Oma **Sartje Saulinggi** yang sangat tulus menyayangi cucu-cucunya terutama penulis sebagai cucu pertama *hehe..* selamat atas ulang tahun pernikahan yang ke-50, Tuhan Yesus selalu menyertai Opa dan Oma di hari tua. Kakek **Pendeta** dan nenek **Menyanyi** terima kasih banyak buat nyanyian kalian berdua

yang selalu merdu di pagi hari mengingatkan penulis untuk bangun beribadah.

7. terima kasih kepada **Rosnatalia Datu Arruan** buat semangat yang tidak terhingga yang kau berikan kepadaku setiap kali saya menghadapi masalah, terima kasih juga untuk nyanyianmu, senyumanmu, dan suaramu yang selalu menjadi obat penyemangat terbaik buat penulis.. kau memang calon dokter yang terbaik.
8. Terima kasih kepada **Bunda, Kak Rahma, dan seluruh pegawai tata usaha** yang telah membantu Chris untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan skripsi ini.
9. penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman seperjuanganku Anak HI'09 antara lain: **Aswani Lienardo, Satkar Ulama, Zulfikar Dilahwangsa, Hutriana, Bama, April, Fatma, Nurul Fajri, Fikri, Nurul Sajidah, Inna, Amdya, Sari, Fitri, Dwi, Disa, Dita, Rahmat, Ardy, Vincent, Halik, Fardillah, Dilla, Ivon, Sutiono, Ridho, Michael, Risky P, Laggam, Afif, Aldi, Ayu, Claudia, Icha, Fais, Riri, Manda, Muspida, Nany, Rian, Syukron, Ishaq dan Chris** Terima kasih banyak atas waktu 4 tahun yang kita jalani bersama. masih ingat rapat angkatan kecil kita dulu di baruga dan bawah perpustakaan. Semua kenangan itu akan terus ada di hatiku, kisah tentang kita HI-UH 2009 angkatan tanpa nama *hahaha*

Intinya untuk Anak HI 09, terima kasih banyak untuk semuanya.

10. **PMKO FISIP UNHAS**, terima kasih banyak PMKOku tercinta untuk segala suka dan duka yang kualami bersama kalian. Terima kasih banyak atas pengalaman yang sangat berharga yang kalian berikan kepada saya, terima kasih juga buat kepercayaan dan dukungan kalian selama saya berkuliah di UNHAS. Teman-teman PMKO angkatan 2009 **Oktavianus Paembonan** (terima kasih banyak untuk rumahmu yang dijadikan sekretariat sejak kita menjadi pengurus) **Marcelia I.R** (terima kasih buat firman yang o tojer.. yang sering kau perengarkan kepada anak 2009) **Erick Bonggasau** (kelak jika telah menjadi dosen jangan pernah menjadi seorang dosen dengan predikat **lale**) **Christiansen, Michael J.L, Vinsensius, Claudia, Inry asli (bukan 10 atau 11) Tety, Hans joni, Dennis, Denden, memey, Rachel, Tian bapa, Daniela**, saya merindukan masa-masa JKP 2009 bersama kalian. kanda-kanda angkatan 2007 **Linda, Tian, Onel dll** dan 2008 **Maya, Endru, Boka, Ivan, Janses dll** saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan kalian berbagi pengalaman dan ilmu kepada saya, adek-adekku angkatan 2010 **Rano, Inri, Tiwi, Jay dll** 2011 **Laras, Indri, Reni, Lyzza, Yiska dll** dan 2012 **Victoria, Kiki, Urlick dll** berikan yang terbaik dari yang bisa kalian berikan buat PMKO FISIP UNHAS

11. Teman-teman yang mengaku sebagai ASET atau PA atau apalah.. **Okta, BTR, Endru, Ivan, Boka, Jansen, Arland, Apri, Rano, Galih, Viktor dll** terima kasih atas kumpul-kumpul tidak jelasnya selama kurang lebih 4 tahun ini.. kalian the best

12. **HIMAHI FISIP UNHAS**, terima kasih banyak untuk banyaknya ilmu yang HIMAHI FISIP UNHAS telah berikan kepada penulis. Penulis juga meminta maaf atas kurangnya kontribusi penulis kepada HIMAHI FISIP UNHAS
13. **GAMARA UNHAS**, terima kasih buat pengalaman yang diberikan selama penulis menjadi anggota.
14. Teman-teman **KKN Angkatan 84 kecamatan Mangarabombang, Takalar**, terima kasih banyak untuk dua bulan penuh kenagan di Mangarabombang, terkhusus kepada teman-teman posko Laikang yang malas dan kuttunya tidak ada yang bisa tandingi, **Fany Lande Pakiding** (Ibu Sekdes cerewet dari teknik pertanian, sekaligus sarjana pertama dari poski Laikang) **Sitti Nurbaya** (fathinnya Marbo cantik tawwa banyak anak marbo suka'ki) **Eko Minysah Saputra** (orang paling ribut di posko marbo hehe sekaligus orang paling banyak idenya) **Dimas Parawansa** (teman poskoku yang paling sering pulang balik makassar)
15. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Hanya doa yang dapat penulis panjatkan sebagai ucapan terima kasih. Semoga Bapa di surga memberikan rejeki dan hikmat kepada kita semua.

Makassar, 31 Desember 2013

Penulis

DAFTAR TABEL

No.	Teks	Hal.
4.1	Hasil Referendum Kepulauan Falkland/Malvinas	67
4.2	Statistik Partisipasi Penduduk Dalam Referendum	68

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	22
BAB II TELAAH PUSTAKA	25
A. Hubungan Argentina – Inggris	25
B. Sengketa Kepulauan Falkland/Malvinas	29
BAB III ARGENTINA DAN INGGRIS DALAM PERMASALAHAN KEPULAUAN FALKLAND / MALVINAS	38
A. Kepulauan Falkland / Malvinas	38
B. Kepentingan Inggris di kepulauan Falkland / Malvinas	44
C. Kepentingan Argentina di kepulauan Falkland / Malvinas	48
BAB IV REFERENDUM INGGRIS DI KEPULAUAN FALKLAND / MALVINAS DAN DAMPAKNYA TERHADAP ARGENTINA	58
A. Kepentingan Inggris dalam Referendum di Kepulauan Falkland/Malvinas	58
B. Dampak Referendum di Kepulauan Falkland/Malvinas terhadap Argentina	72
BAB V PENUTUP	80
A . Kesimpulan	80
B . Saran-saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa wilayah merupakan salah satu kajian yang ada dalam studi hubungan internasional. Sengketa wilayah adalah keadaan dimana dua negara atau lebih memperebutkan kedaulatan atas sebuah wilayah. Menurut Holsti sengketa wilayah dapat terjadi karena adanya benturan kepentingan antar negara di mana dua atau lebih negara saling berupaya untuk melaksanakan kepentingannya melalui tuntutan dan tindakan yang saling berlawanan antar negara.¹ Kepentingan nasional sebuah negara akan mempengaruhi perilaku negara tersebut dalam berinteraksi dengan negara lain. Apabila terdapat dua atau lebih negara yang memiliki kepentingan yang sama terhadap sebuah wilayah, maka negara-negara yang memiliki kepentingan tersebut akan berusaha untuk mendapatkan kedaulatan wilayah yang disengketakan melalui jalur diplomasi atau bahkan melalui tindakan militer.

Sengketa wilayah terjadi karena adanya perbedaan persepsi atas batas wilayah dan juga nilai strategis dari suatu wilayah menjadi pemicu terjadinya sengketa wilayah, perbedaan persepsi dalam melihat suatu wilayah terjadi karena masing-masing negara mempunyai acuan yang berbeda dalam mengklaim sebuah wilayah akibat adanya catatan historis

¹ K.J. Holsti, 1988, *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*, 4nd ed, terj. M. Tahir Azhary, Jakarta, Erlangga, hal. 170.

mengenai sebuah wilayah, faktor kedekatan secara geografis dengan sebuah negara.

Masalah sengketa wilayah kemudian menjadi sangat penting bagi negara karena hal ini menyangkut kedaulatan sebuah negara. Kedaulatan negara merupakan otoritas untuk mengatur seluruh wilayah yang berada di dalam wilayahnya. Oleh sebab itu jika sebuah wilayah yang merupakan bagian dari suatu negara di klaim sepihak oleh negara lain maka suatu negara akan mempertahankan wilayahnya dengan melakukan perundingan maupun melalui aksi militer.

Sengketa wilayah antara Republik Indonesia dengan Malaysia merupakan salah satu contoh dari kajian sengketa wilayah. Indonesia dan Malaysia terlibat dalam sengketa wilayah Pulau Sipadan dan Ligitan. Kedua pulau ini mulai disengketakan sejak tahun 1967 ketika Indonesia dan Malaysia memasukkan Sipadan dan Ligitan kedalam batas wilayahnya dalam pertemuan teknis hukum laut kedua negara.

Menurut klaim Indonesia pulau Sipadan dan Ligitan merupakan wilayah sah Indonesia didasari atas fakta yang menunjukkan bahwa adanya perjanjian antara Belanda dan Inggris pada tahun 1891, pada Pasal IV perjanjian tersebut menyebutkan bahwa garis batas kedua negara adalah garis lintang $4^{\circ} 10'$ di pantai timur Pulau Kalimantan terus ke Timur memotong Pulau Sebatik dan menempatkan kedua pulau itu di bawah garis lintang tersebut yang berarti milik Belanda. Sedangkan menurut klaim pemerintah Malaysia pulau Sipadan dan Ligitan

merupakan wilayah sah Malaysia karena sejak tahun 1917 Malaysia telah melakukan fungsi legislatif atas kedua pulau tersebut dengan dikeluarkannya peraturan perlindungan penyu, serta mengeluarkan perizinan untuk menangkap telur penyu. Malaysia juga telah membangun mercusuar di Sipadan dan Ligitan pada tahun 1962 dan 1963 yang terus dipelihara sejak kemerdekaan Malaysia.

Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menyelesaikan Sengketa wilayah ini melalui Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan wilayah kedaulatan Malaysia dengan argumen bahwa perjanjian antara Inggris dan Belanda adalah perjanjian batas wilayah darat, bukan wilayah perairan dan sangat sulit untuk dijadikan argumen untuk mengklaim Sipadan dan Ligitan. Menurut Mahkamah Internasional, Indonesia juga sebelumnya tidak pernah melakukan protes atas tindakan kedaulatan Malaysia di Sipadan dan Ligitan.

Salah satu dari sekian banyak sengketa wilayah yang terjadi di dunia internasional adalah sengketa wilayah antara Argentina dan Inggris mengenai status kepemilikan atas pulau Falkland (nama resmi yang diberikan oleh pemerintah Inggris) Malvinas (nama resmi yang diberikan oleh pemerintah Argentina). Kepulauan Falkland/Malvinas merupakan gugusan pulau yang terdiri dari dua pulau besar yaitu Falkland/Malvinas barat dan Falkland/Malvinas timur. Secara geografis kepulauan ini

berdekatan dengan Argentina yaitu sekitar 480 km di sebelah barat Argentina.

Perebutan wilayah antara Argentina dan Inggris ini mulai memanas pada tahun 1982 ketika Argentina yang pada saat itu berada di kekuasaan junta militer mengklaim kepulauan Falkland/Malvinas sebagai bagian dari wilayah Argentina, kemudian pada tanggal 19 Maret 1982 pemerintah Argentina mengirim kapal rongsoan ke pulau Georgia Selatan dan keesokan harinya mengibarkan bendera Argentina serta menginvasi kepulauan tersebut. Tindakan provokasi Argentina ini memicu pemerintah Inggris untuk mengerahkan angkatan militernya ke kepulauan ini, yang kemudian menandai perang perebutan kepulauan Falkland/Malvinas yang berlangsung sekitar dua bulan dan menewaskan sekitar 1000 tentara². Hingga saat ini penyelesaian dari kasus sengketa pulau antara Argentina dan Inggris ini belum selesai.

Perbedaan persepsi antara Argentina dan Inggris mengenai kepulauan Falkland/Malvinas terjadi selain karena faktor geografis di mana kepulauan Falkland/Malvinas berada dekat dengan Argentina, sedangkan pusat pemerintahan Inggris ada di benua Eropa. Argentina juga merasa bahwa kepulauan Falkland/Malvinas merupakan wilayah jajahan Spanyol ketika Argentina meraih kemerdekaan pada tahun 1816 dari Spanyol. Sedangkan klaim Inggris atas Falkland/Malvinas berdasar pada

² Globalsecurity, diambil dari <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/malvinas.htm> diakses pada tanggal 15 juli 2013

keberhasilan Inggris menaklukan Spanyol pada tahun 1833 yang kemudian mengambil kepulauan Falkland/Malvinas sebagai wilayah kekuasaannya.

Hubungan diplomatik antara Argentina dan Inggris semenjak perang Falkland/Malvinas menjadi kurang stabil. Sengketa wilayah yang hingga saat ini belum menemui kesepakatan menyebabkan stabilitas keamanan di sekitar kepulauan Falkland/Malvinas menyebabkan kepulauan ini rawan perang. Pada bulan September tahun 1995 hubungan diplomatik Argentina – Inggris mulai membaik ketika kedua negara menandatangani perjanjian kerja sama eksplorasi minyak dan gas di lautan Pasifik Barat Daya.³ Hubungan Argentina – Inggris kembali memanas ketika Inggris pada bulan Februari 2012 mengerahkan kapal perang di kepulauan Falkland/Malvinas Hal ini memicu protes keras dari pemerintah Argentina. Pada bulan Juni 2012 Presiden Argentina Cristina Fernandez kembali menegaskan klaimnya terhadap kepulauan Falkland/Malvinas di hadapan komite dekolonisasi PBB dan menganggap tindakan Inggris menduduki kepulauan Falkland/Malvinas merupakan sebuah penghinaan bagi Argentina.⁴

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan resolusi untuk menyelesaikan sengketa kepulauan Falkland/Malvinas yang telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun. isi resolusi tersebut adalah agar

³ Globalsecurity, diambil dari <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/malvinas.htm> di akses tanggal 14 juli 2013.

⁴ Khairisa ferida. diambil dari <http://international.okezone.com/read/2012/06/15/414/647758/presiden-argentina-kembali-klaim-kepemilikan-Falkland/Malvinas> di akses pada tanggal 14 juli 2013.

Argentina dan Inggris mengadakan perundingan membahas mengenai kepemilikan atas kepulauan Falkland/Malvinas. Namun usaha untuk mengadakan perundingan antar kedua negara bersengketa selalu menemui jalan buntu karena pemerintah Inggris menolak berunding dengan Argentina. Bagi pemerintah Inggris Falkland/Malvinas merupakan bagian dari wilayah Inggris yang sah dan tidak perlu ada perundingan untuk membahas status kepulauan Falkland/Malvinas⁵

Hasil referendum yang dilaksanakan oleh pemerintah Inggris yang diawasi langsung oleh pengamat internasional dari Kanada, Cile, Meksiko, Selandia Baru, Paraguay, Amerika Serikat, dan Uruguay, pada tanggal 9-11 Maret 2013 menetapkan bahwa rakyat kepulauan Falkland/Malvinas memilih tetap menjadi bagian koloni Inggris. Hasil referendum ini ditolak oleh pemerintah Argentina dengan alasan bahwa referendum yang dilaksanakan oleh Inggris tidak memiliki landasan hukum karena tidak diadakan atau diawasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tindakan Argentina menolak hasil referendum di kepulauan Falkland/Malvinas membuat penyelesaian sengketa wilayah dengan pemerintah Inggris menjadi semakin sulit. Argentina tetap menganggap kepulauan Falkland/Malvinas merupakan bagian dari wilayah Argentina dan meminta Inggris untuk mengembalikan kepulauan Malvinas ke Argentina.

Sikap tegas Argentina menolak hasil referendum yang menyatakan bahwa rakyat di kepulauan Falkland/Malvinas ingin berada di bawah

⁵ UN Documents on Falkland/Malvinas Islands dispute <http://www.staff.city.ac.uk/p.willetts/SAC/UN/UN-LIST.HTM> di akses pada tanggal 14 juli 2013

naungan negara Inggris, membuat hubungan bilateral Inggris dan Argentina kembali memanas. Argentina dengan tegas menyatakan bahwa penduduk yang berada di kepulauan tersebut bukan penduduk asli kepulauan Falkland melainkan warga negara Inggris yang menetap di kepulauan tersebut sejak pemerintah Inggris berhasil menguasai wilayah tersebut pasca perang kemenangan Inggris di perang Falkland/Malvinas,⁶ Sedangkan pemerintah Inggris merasa bahwa hasil referendum tersebut sah karena sudah sesuai dengan piagam PBB pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap negara anggota PBB wajib menghormati perdamaian dengan cara menjunjung tinggi persamaan hak dan menghormati penentuan nasib sendiri oleh rakyat.⁷

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Referendum yang dilaksanakan oleh pemerintah Inggris di kepulauan Falkland/Malvinas menyebabkan hubungan diplomatik antara Argentina dan Inggris kembali memanas, menjadi alasan penulis untuk mengadakan penelitian. Penelitian ini akan membahas mengenai nilai strategis kepulauan Falkland/Malvinas bagi kedua negara, sehingga Argentina dan Inggris berusaha untuk mendapatkan status kedaulatan atas kepulauan tersebut. Penulis perlu untuk mengetahui latar belakang dan proses referendum yang diadakan oleh pemerintah Inggris di kepulauan

⁶ Falkland/Malvinas Island Government diambil dari <http://www.Falkland/Malvinass.gov.fk/self-governance/relationship-with-argentina/> di akses pada 16 juli 2013

⁷ British Government diambil dari <https://www.gov.uk/government/policies/supporting-the-Falkland/Malvinas-islanders-right-to-self-determination> di akses pada 16 juli 2013

Falkland/Malvinas. Selain itu penulis juga perlu untuk mengetahui dampak dari referendum tersebut terhadap kepentingan nasional Argentina dan tindakan negara tersebut untuk mendapatkan status kedaulatan atas kepulauan Falkland/Malvinas

penulis membatasi penelitian ini selama sepuluh tahun terakhir (2003-2013). Penulis kemudian merumuskan dua pertanyaan penelitian untuk menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepentingan Inggris dalam referendum di kepulauan Falkland/Malvinas.
2. Bagaimana dampak referendum Inggris di kepulauan Falkland/Malvinas terhadap Argentina.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kepentingan nasional Inggris dalam referendum di kepulauan Falkland/Malvinas
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana dampak referendum kepulauan Falkland/Malvinas tersebut terhadap klaim kedaulatan Argentina pada kepulauan Falkland/Malvinas

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsi nyata dalam pemberian informasi dan dapat menjadi bahan kajian bagi pengembangan Studi Hubungan Internasional di masa mendatang, terkhusus bagi pemerhati masalah konflik internasional dan bagi peneliti yang tertarik untuk menganalisis Sengketa wilayah Inggris – Argentina.
- b. Diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi pengkaji konflik internasional khususnya mengenai wilayah sengketa (*dispute area*)

D. Kerangka Konseptual

Sengketa wilayah merupakan fenomena hubungan internasional yang membutuhkan waktu sangat panjang dalam penyelesaiannya, ada banyak konsep yang telah dikemukakan oleh ahli hubungan internasional dalam melihat fenomena sengketa wilayah ini, penulis mencoba melihat fenomena ini dengan menggunakan konsep yaitu:

A. Kedaulatan Negara

Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi dalam sebuah wilayah, memiliki peran sentral dalam kehidupan modern. Negara memiliki hak untuk menguasai dan mengatur wilayahnya, membangun pertahanan nasional, pengumpulan pajak, dan mengatur ekonomi merupakan fungsi pemerintahan negara. Syarat untuk membentuk negara

menurut Sitepu adalah negara wajib memiliki atribut-atribut seperti, penduduk, wilayah, pemerintah, kedaulatan, dan mendapatkan pengakuan dari negara lain.⁸

Menurut Jean Bodin kedaulatan adalah inti dari sebuah kesatuan politik yang disebut negara, negara tidak akan terbentuk tanpa kedaulatan, kedaulatan negara merupakan kekuasaan tertinggi dalam sebuah wilayah yang bersifat mutlak dan abadi, yang terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi.⁹

Sifat kedaulatan menurut Jean Bodin:¹⁰

1. Asli, tidak di turunkan dari suatu kekuasaan lain.
2. Tertinggi, tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaannya.
3. Bersifat abadi atau kekal.
4. Tidak dapat dibagi-bagi karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi.
5. Tidak dapat dipindahkan atau diserahkan kepada badan lain.

Kedaulatan merupakan hak suatu negara untuk mengatur wilayahnya, menurut perjanjian westphalia negara yang berdaulat merupakan negara yang memiliki *obligation* (kewajiban) dan *recognition* (pengakuan).¹¹ Menurut Pereira kedaulatan negara merupakan akta politik yang menjelaskan konsekuensi legalitas hukum, oleh karena itu, kedaulatan eksternal sebuah negara atau kedaulatan dari sudut pandang

⁸ P. A. Sitepu, 2011, *Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hal. 127.

⁹ T.M. Rudy, 2005, *Administrasi & Organisasi Internasional*. Bandung, PT Refika Aditama, hal. 35

¹⁰ Ibid, hal 35

¹¹ Andre H. Pareira, 1994, *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*, Bandung, PT. Citra Adytia Bakri, hal 94

hubungan internasional, selalu harus melalui pembahasan politik sebelum menjadi ketentuan hukum.¹²

Menurut menurut Robert Jackson dan Georg Sorensen kedaulatan merupakan perangkat aturan yang dijalankan oleh negara, yang menyatakan dan mengatur kemerdekaan eksternal dan kekuasaan negara domestik.¹³ Kedaulatan negara memberikan hak kepada negara untuk menjalankan aturan dalam wilayah teritorialnya, negara juga dapat menggunakan kekuatan militer untuk melindungi dan mempertahankan wilayahnya dari negara lain maupun kelompok separatis.

Negara sebagai lembaga resmi yang berhak mengatur sebuah wilayah mempunyai tanggung jawab penuh untuk menjaga dan mempertahankan integritas negaranya. Prinsip-prinsip dasar dari konsep kedaulatan seperti prinsip non-intervensi terhadap masalah dalam negeri setiap negara, prinsip imunitas bagi tugas diplomatik, serta pengakuan terhadap negara (lembaga bukan gereja) sebagai lembaga yang berhak atas kontrol politik di sebuah wilayah, prinsip dasar dalam membangun hubungan antar negara ini, merupakan beberapa point hasil kesepakatan dari perjanjian Westphalia pada tahun 1648, perjanjian ini menjadi landasan bagi negara-negara di Eropa untuk membangun hubungan antar negara.¹⁴

¹² *Ibid.* Hal. 91

¹³ Jackson, Robert dan Georg Sorensen. 2009, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, terj, Dadan Suryadiputra, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal 338

¹⁴ Andre H. Pareira, 1994, *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*, Bandung, PT. Citra Adytia Bakri, hal 91

Kekuasaan suatu negara untuk mengatur dan menjalankan wilayahnya ini bersifat mutlak dan tidak boleh dipengaruhi oleh negara atau organisasi lain. Pelanggaran atas kedaulatan suatu negara baik dari dalam negara sendiri seperti kelompok separatis maupun dari luar negara dapat berakibat pada peperangan.

Kedaulatan negara dalam menjalankan pemerintahan di dalam sebuah wilayah bersifat mutlak dan harus dipatuhi oleh masyarakat yang berdomisili dalam wilayah tersebut. Antonius Sitepu mengatakan bahwa:

“Negara, sebagai suatu organisasi kekuasaan menempati posisi yang sentral dalam kehidupan kolektif manusia modern, negara tidak hanya dapat dipandang lagi sebagai sebuah entitas yang absolut, di mana semua *stakeholder* pendukung adanya negara harus tunduk secara mutlak terhadap penguasa negara.”¹⁵

Kedaulatan negara dapat didefinisikan sebagai hak yang dimiliki aktor negara untuk menentukan arah kebijakan dalam negeri maupun luar negeri.¹⁶ Kedaulatan telah mengalami pergeseran makna sejak tahun 1945, kemunculan organisasi internasional sebagai bagian dari dinamika hubungan internasional, menyebabkan penentuan kebijakan sebuah negara tidak boleh bertentangan dengan keputusan organisasi internasional yang diikuti oleh negara tersebut.

Menurut Pereira kedaulatan negara merupakan akta politik yang menjelaskan konsekuensi legalitas hukum, oleh karena itu, kedaulatan

¹⁵ P. A. Sitepu, 2011, *Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hal. 121.

¹⁶ Martin Griffiths dan Terry O’Callaghan, 2002, *International Relations: The Key Concepts*, Routledge, London, hal. 316.

eksternal sebuah negara atau kedaulatan dari sudut pandang hubungan internasional, selalu harus melalui pembahasan politik sebelum menjadi ketentuan hukum.¹⁷ Negara sebagai suatu aktor hubungan internasional dalam membangun hubungan dengan negara lain, memiliki status yang sejajar dan independen, konsep kedaulatan memberikan kesetaraan bagi semua negara, tindakan intervensi atau provokasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan.

Krasner membedakan kedaulatan menjadi 3 kelompok, pertama, kedaulatan hukum internasional, yaitu suatu negara akan mendapatkan status kedaulatannya jika di akui oleh negara lain dan secara resmi menjadi anggota organisasi internasional. Kedua, kedaulatan westphalia merupakan perjanjian yang menegaskan bahwa setiap negara adalah otonom, dan melarang intervensi terhadap masalah internal negara lain. Ketiga kedaulatan domestik merupakan pengakuan dari warga negara terhadap struktur kekuasaan wilayahnya.¹⁸

Hukum internasional menurut Sefriani membagi kedaulatan negara menjadi empat (4) bagian, yaitu *wilayah daratan* merupakan wilayah yang sangat penting bagi suatu kelompok kekuasaan untuk membangun negara, di dalam wilayahnya negara memiliki hak untuk melaksanakan kedaulatan atas orang, benda, juga peristiwa atau perbuatan hukum yang terjadi di wilayahnya. *Wilayah laut* sebuah negara adalah perairan lepas pantai

¹⁷ Andre H. Pareira, 1994, *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*, Bandung, PT. Citra Adytia Bakri, hal. 94.

¹⁸ Peer Schouten, 2012, *Theory Talk, Perbincangan Pakar Sedunia tentang Teori Hubungan Internasional Abad ke-21*. terjemahan Bambang Wahyu Nugroho, Yogyakarta, LP3M dan PPSK, hal 143.

beserta tanah yang ada di bawahnya, wilayah laut terbagi menjadi wilayah yang dikuasai oleh suatu negara dengan laut yang tidak dikuasai oleh negara. *Wilayah udara* merupakan wilayah yang berada di atas wilayah daratan dan wilayah laut sebuah negara. *Wilayah ruang angkasa* menurut Space Treaty 1967 wilayah luar angkasa merupakan wilayah milik bersama seluruh umat manusia, oleh sebab itu ruang angkasa tidak dapat diklaim atau dibawah kedaulatan suatu negara.¹⁹

Pengakuan (*recognition*) adalah salah satu pembentukan sebuah negara, negara yang baru memisahkan diri dari negara induknya atau hilangnya negara akibat berintegrasi dengan negara lainnya harus mendapatkan pengakuan dari negara lain agar diterima sebagai anggota masyarakat internasional. pengakuan tersebut menurut Jemadu dapat berupa:²⁰

1. Pengakuan tidak langsung

Pengakuan tidak langsung adalah keadaan-keadaan yang secara tegas mengindikasikan kemauan untuk menjalin hubungan resmi dengan negara atau pemerintah baru.

2. Pengakuan bersyarat

Pengakuan bersyarat merupakan pemberian pengakuan kepada negara baru dengan syarat, berupa suatu kewajiban yang harus dipenuhi negara baru tersebut

¹⁹ Sefriani, 2011, *Hukum Internasional: Suatu pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 203-209

²⁰ Aleksius Jemadu, 2007, *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*. Graha Ilmu, Yogyakarta, hal 78

3. Pengakuan kolektif

Merupakan pemberian pengakuan secara kolektif oleh beberapa negara. pengakuan ini terjadi jika melalui forum-fourm internasional.

Berdasarkan jenisnya pengakuan dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu; pengakuan *de jure* dan pengakuan *de facto*. Pengakuan *de jure* berarti menurut negara yang mengakui, negara atau pemerintah yang diakui secara formal telah memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum internasional untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat internasional. sedangkan pengakuan *de facto* berarti bahwa menurut negara mengakui, untuk sementara dan secara temporer serta dengan segala reservasi yang layak di masa mendatang, bahwa negara atau pemerintahan yang diakui telah memenuhi syarat berdsarkan fakta.²¹

Prinsip *recognition* dari kedaulatan sebagai suatu pengakuan politik dari negara lain terhadap pemerintahan suatu negara dalam wilayah tertentu membuat negara yang memberikan pengakuan politik kepada negara baru, mengakui akan adanya tatanan pemerintahan yang berdaulat dalam wilayah tersebut. Pengakuan dari negara lain sangat penting bagi sebuah negara karena dengan adanya pengakuan dari negara lain, maka pemerintahan negara tersebut dapat menjalin hubungan kerjasama dengan negara yang mengakuinya.

²¹ J.G. Starke, 1986 *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Penerbit Justitia Studi Group Bandung, , hal 80

Prinsip kedaulatan negara merupakan prinsip yang wajib dimiliki oleh seluruh organisasi kekuasaan berbentuk negara. Kedaulatan dibutuhkan oleh negara untuk mengatur dan menjalankan pemerintahannya dan menjadi syarat negara untuk membangun hubungan dengan negara lain. Kedaulatan wajib dipertahankan oleh negara baik itu dengan cara membangun hubungan yang baik dengan negara lain, maupun dengan mempertahankan kedaulatan dengan membangun militer yang kuat.

B. Kepentingan Nasional.

Dalam hubungan internasional, diketahui bahwa kepentingan nasional merupakan alasan negara dalam melakukan interaksi dengan negara lain, menurut Jack Plano kepentingan nasional adalah suatu strategi atau susunan rencana untuk menghadapi negara lain atau unit politik internasional yang dibentuk oleh pembuat keputusan dalam suatu negara yang bertujuan untuk mencapai tujuan nasional sebuah negara.²²

Kepentingan nasional merupakan tujuan, cita-cita dan harapan yang hendak dicapai oleh suatu Negara, untuk mencapai tujuan negara tersebut, maka negara menyusun kebijakan luar negeri sebagai salah satu metode pencapaian kepentingan nasional. Dalam penyusunan kebijakan luar negeri negara wajib mempertimbangkan *power* yang dimilikinya sebagai modal utama yang harus dimiliki oleh tiap-tiap Negara dalam usaha untuk mencapai cita-cita atau kepentingan nasionalnya masing-masing. Oleh

²² Putra Abidin 1999 Jack C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, 5-6

karena itu, kepentingan nasional, kebijakan luar negeri dan *power masing-masing negara* sangatlah erat hubungannya dan tak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu sebagai organisasi resmi yang berhak mengatur dan menguasai sebuah wilayah Negara berhak memiliki kepentingan nasional, karena tidak ada institusi dan organisasi selain Negara yang mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan luar negeri yang berorientasi pada tercapainya kepentingan nasional.

Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda, dan untuk mencapai kepentingan nasionalnya sebuah negara membutuhkan kerjasama serta bantuan dari negara lain. Kepentingan nasional sebuah negara tergantung dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kebutuhan sebuah negara, kepentingan nasional sebuah negara selain dipengaruhi dari faktor internal, juga dipengaruhi oleh faktor eksternal sebuah negara, seperti yang dikemukakan oleh Nuechterlein²³:

Kepentingan nasional merupakan sebuah produk dari proses politik suatu negara yang tiba pada suatu keputusan tentang pentingnya suatu peristiwa yang terjadi diluar terhadap keamanan dalam negeri.

Hubungan dengan negara lain mempengaruhi proses penentuan kebijakan setiap negara, kejadian di negara lain, serta tindakan dari dari negara lain memiliki pengaruh dalam proses penentuan kebijakan sebuah negara. Hubungan dengan negara lain dapat berjalan harmonis ketika kepentingan setiap negara dapat terakomodasi namun jika kepentingan

²³ Supardi, 1985, *Politik Luar Negeri Australia di bawah parta buruh*, Jakarta, Grafindo Utama, hal 3.

nasional setiap negara tidak terakomodasi dengan baik, maka dapat menimbulkan persaingan, dan bahkan perang.

Kepentingan nasional menurut Mas'ood merupakan kemampuan minimum suatu negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik dan budayanya dari negara lain.²⁴ Pernyataan Mas'ood tersebut mendukung pendapat sebagian besar pengkaji hubungan internasional bahwa kepentingan nasional adalah keseluruhan nilai yang hendak ditegakkan oleh suatu negara.

Kepentingan nasional suatu negara sangat tergantung pada waktu, situasi, dan kondisi yang terjadi di dalam dan di luar negeri suatu negara, oleh sebab itu kepentingan nasional bersifat sementara. Kepentingan nasional suatu negara akan selalu berubah karena perubahan situasi sosial-budaya, ekonomi, politik dan perubahan pemikiran dari pembuat kebijakan yang terjadi dalam negara.

Definisi kepentingan nasional menurut Coloumbis dan wolfe dapat dikategorikan kedalam 10 kategori kepentingan nasional yang digunakan dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan – kebijakan baru, atau memodifikasi kebijakan yang lama, yaitu:

1. Kriteria Filosofi-Operasional
2. Kriteria Ideologis
3. Kriteria Moral dan Hukum

²⁴ Dede Rohman, 2003, *Dampak Kerjasama militer Amerika Serikat – Indonesia Terhadap Stabilitas Keamanan Asia Tenggara*, Makassar, Universitas Hasanuddin, hal 16

4. Kriteria Pragmatis
5. Kriteria Kemajuan Profesi
6. Kriteria Partisan
7. Kriteria Kepentingan Birokrasi
8. Kriteria Etnik / Rasial
9. Kriteria Kelas dan Status
10. Kriteria Ketergantungan Luar Negeri²⁵

Terdapat perbedaan antara klasifikasi kepentingan nasional antara Coloumbis dan Wolfe dengan klasifikasi kepentingan nasional menurut Joseph Frankel, kepentingan nasional menurut Frankel hanya terdiri atas 3 kelompok kategori yaitu bersifat aspirasional, operasional dan eksplanatori dan polemik.²⁶

Konsep kepentingan nasional menurut Morgenthau merupakan kebijakan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup suatu negara, dengan cara melakukan upaya - upaya logis dalam mempertahankan kelangsungan hidup negara tersebut.²⁷ kelangsungan hidup negara tersebut dapat berupa Integritas wilayah, pemerintahan, kemajuan ekonomi, politik, dan sebagainya. Sedangkan menurut Menurut Plano dan Olton, Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum, tetapi merupakan unsur kebutuhan yang menjadi sangat vital bagi suatu negara,

²⁵ Evisanty Sibala, 2006, *Kebijakn Republik Rakyat Cina Dalam Upaya Mewujudkan Reunifikasi dengan Taiwan*, Makassar, Universitas Hasanuddin, hal 24

²⁶ *Ibid* hal 25

²⁷ Hans J. Morgenthau, 1990, *Politik Antar Bangsa, Edisi Keenam, Buku Pertama*, Terjemahan S. Maimoen, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hal 72

keutuhan wilayah, kemerdekaan, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi.²⁸

Kepentingan nasional sangat penting bagi sebuah negara, demi mewujudkan kepentingan nasionalnya, setiap negara memiliki kepentingan untuk menjaga kedaulatan, perekonomian yang maju, keutuhan bangsa dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya di dunia internasional.

Sistem internasional ikut mempengaruhi sebuah negara dalam menentukan kebijakan yang akan ditentukan. Interaksi dengan negara lain serta kejadian-kejadian internasional dapat mempengaruhi kepentingan nasional sebuah negara. Hal ini sesuai dengan pendapat Mas'ood yang menyebutkan bahwa:

“Bangsa-bangsa di dunia ini dan interaksi diantara mereka merupakan suatu sistem. Struktur itu dan perubahan-perubahan yang dialaminya selama ini telah menentukan perilaku aktor-aktor hubungan internasional yang terlibat di dalamnya. Sistem sebagai lingkungan telah menentukan perilaku negara bangsa.”²⁹

Holsti mengelompokkan kepentingan nasional kedalam 3 pokok, yaitu:

1. Kepentingan utama merupakan dasar dalam penentuan kebijakan yang akan ditentukan oleh negara. Kepentingan utama merupakan tujuan dimana masyarakat secara sukarela berkorban untuk mencapai kepentingan tersebut. Kepentingan utama biasa disebut

²⁸ Jack C. Plano & Roy Olton, 1982, *Kamus Hubungan Internasional*, Bandung, Arabdin, hal 7.

²⁹ Mochtar Mas'ood, 1982, *Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta, PAU-SS, UGM, x, hal 211.

prinsip dasar politik luar negeri yang diterima oleh seluruh masyarakat.

2. Kepentingan jangka pendek merupakan hasil dari usaha pemerintah untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan masyarakatnya, usaha pemerintah dapat berupa tindakan langsung ke masyarakat maupun dengan meminta bantuan internasional. Selain itu kepentingan jangka pendek juga merupakan usaha pemerintah dalam meningkatkan prestise negaranya di dunia internasional
3. Kepentingan jangka panjang secara umum dapat di artikan sebagai usaha pemerintah untuk melakukan kerja sama internasional dalam membangun militer yang tangguh untuk mempertahankan integritas wilayahnya.³⁰

Kepentingan nasional memiliki kaitan yang erat dengan masalah keamanan, integritas negara. Kepentingan nasional sebuah negara akan mudah tercapai jika negara mampu menjaga keamanan nasionalnya.

Rudy membagi kepentingan nasional kedalam 3 kelompok kepentingan yaitu, *physical security* adalah kepentingan negara untuk menjamin keamanan warga negaranya secara fisik; *rules and intitutions* negara berkepentingan untuk membentuk konstitusi dan aturan formal lainnya untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh warga negaranya; *prosperity*

³⁰ K.J. Holsti, 1983, *Politik Internasional, kerangka untuk analisis*, edisi keempat jilid 2 terjemahan M. Tahir Azhary, Jakarta, Erlangga, hal 136.

yaitu sumber modal, barang mentah, sistem keuangan dan lain-lain yang menjadi modal negara untuk mencapai tujuan nasional.³¹

Kepentingan nasional merupakan konsep dasar dalam penentuan kebijakan politik luar negeri sebuah negara. Meskipun terdapat definisi yang beragam tentang konsep kepentingan nasional, secara umum dapat disimpulkan bahwa kepentingan nasional merupakan arah dari kebijakan sebuah negara.

C. Referendum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Referendum merupakan suatu penyerahan keputusan dari pemerintah kepada rakyat dengan cara pemungutan suara.³² Referendum dapat dilaksanakan oleh sebuah negara jika rakyat merasa pemerintah tidak dapat menyelesaikan suatu masalah, dalam referendum hanya ada dua pilihan yang dapat dipilih oleh masyarakat ya atau tidak.

Referendum menurut Piliang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan suaranya secara langsung dalam masalah tertentu.³³ Referendum dapat menjadi acuan pemerintah dalam menetapkan sebuah keputusan, terutama keputusan yang menyangkut mengenai hak-hak rakyat seperti kemerdekaan, perluasan wilayah dan penyatuan atau pemisahan sebuah wilayah.

³¹ T.M. Rudy, 2002 , *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung, PT Refika Aditama, hal. 65

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia diambil dari <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php> diakses pada tanggal 15 juli 2013

³³ Toni A. Pito, Efriza dan Kemal Fasyah 2006, *Mengenal Teori-Teori Politik, Dari Sistem Politik sampai Korupsi*. Bandung, Penerbit Nuansa, , hal 158

Menurut Michel Gallagher pemungutan suara secara nasional mengenai suatu masalah politik merupakan cara yang sering dilakukan oleh banyak negara di dunia, ada dua jenis penyelesaian masalah dengan cara pemungutan suara menurut Gallagher, yaitu:

1. Pemungutan suara secara inisiatif, yaitu pemungutan suara yang diminta oleh sejumlah warganegara biasa, biasanya dilakukan dengan menandatangani sebuah petisi.
2. Pemungutan suara peblisit, yaitu pemungutan suara yang diadakan pada situasi yang tidak betul-betul murni demokratis.³⁴

menurut jenisnya referendum terdiri atas 3 jenis yaitu:

1. Referendum Obligator (yang wajib) dimana berlakunya suatu undang-undang yang dibuat parlemen ialah setelah disetujui oleh rakyat melalui suara terbanyak. Referendum semacam ini dilakukan terhadap undang-undang yang menyangkut hak-hak rakyat.
2. Referendum Fakultatif suatu undang-undang yang dibuat oleh parlemen setelah diumumkan, beberapa kelompok masyarakat yang berhak meminta disahkan melalui referendum. Ini biasanya dilakukan terhadap undang-undang biasa.
3. Referendum Consultatif, yaitu referendum untuk soal-soal tertentu yang teknisnya, rakyat tidak tahu.³⁵

³⁴ *Ibid. hal 158*

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia online diambil dari <http://kbbi.web.id/referendum> diakses pada tanggal 15 juli 2013

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian *deskriptif-analitik*, dimana penulis akan menggambarkan bagaimana hubungan diplomatik Argentina – Inggris sebelum referendum kepulauan Falkland/Malvinas dan dampak referendum tersebut terhadap Argentina serta perlu berdasarkan fakta empirik. Tipe penelitian *deskriptif-analitik* dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena yang terjadi yang relevan dengan masalah yang diteliti, penulis juga akan menggambarkan analisis tentang latar belakang dan Proses Inggris mengadakan referendum di kepulauan Falkland/Malvinas serta dampak referendum tersebut terhadap Argentina

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai literatur dan hasil olahan yang diperoleh dari berbagai sumber termasuk media *on-line*. Jenis data yang dimaksud di atas dapat berupa berita di surat kabar ataupun media *on-line* yang terkait dengan topik pembahasan dimulai dari profil Negara Argentina, Negara Inggris, dan Kepulauan Falkland/Malvinas, pengaruh sengketa wilayah terhadap masyarakat kepulauan Falkland/Malvinas, proses penyelesaian Sengketa wilayah antara Pemerintah Argentina dan pemerintah Inggris, peranan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa

wilayah tersebut, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat, dan data terkait lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah telaah pustaka (*Library Search*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang telah dibahas, dan kemudian menganalisisnya. Literatur ini berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, dan situs-situs internet atau pun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah penulis teliti. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini telah dikumpulkan dari tempat-tempat berikut ini:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin di Makassar.
- b. Perpustakaan Fisip Universitas Hasanuddin di Makassar.
- c. Perpustakaan Pusat Universitas Fajar di Makassar.
- d. Perpustakaan Sahabat Bakti di Makassar.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dengan menganalisa data-data mengenai pernyataan-pernyataan resmi pemimpin kedua negara mengenai referendum yang diadakan Inggris dikepulauan Falkland/Malvinas. Dan dampak atau reaksi yang dilakukan oleh kedua negara terhadap hasil

referendum melalui pernyataan tertulis atau tindakan diplomatik Argentina dan Inggris yang kemudian disimpulkan oleh penulis.

5. Metode Penulisan

Penulis menggunakan metode deduktif, dimana penulis terlebih dahulu akan menggambarkan sengketa wilayah antara Argentina dan Inggris dan bagaimana proses kedua negara berusaha untuk mendapatkan kedaulatan atas kepulauan Falkland/Malvinas dan bagaimana kemudian Inggris mengambil keputusan untuk mengadakan referendum politik di kepulauan Falkland/Malvinas serta proses berlangsungnya referendum, dan reaksi Argentinian terhadap pelaksanaan referendum tersebut lalu kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Hubungan Inggris – Argentina

Dalam Jurnal yang ditulis oleh Klauss Dodds yang diterbitkan oleh *International Affairs* tahun 2012, Dodds mengatakan bahwa prospek hubungan Argentina-Inggris yang mulai membaik di akhir tahun 1990-an, namun kembali memburuk sejak tahun 2003.

Pernyataan David Cameron mengenai posisi Inggris terhadap kepulauan Falkland/Malvinas pada 18 Januari 2012 yang menyatakan bahwa Inggris mendukung penuh niat penduduk kepulauan Falkland/Malvinas untuk mengadakan referendum dan pidato Presiden Kirchner pada April 2012 yang menyatakan bahwa Inggris masih mengadakan praktek kolonialisme dengan menjajah kepulauan Falkland/Malvinas mengindikasikan bahwa hubungan diplomatik kedua negara tengah mengalami penurunan.

Dalam jurnal penelitiannya, Klauss Dodds menjelaskan bahwa pada masa pemerintahan Carlos Menem, Argentina melakukan normalisasi hubungan dan mengadakan kerjasama dengan pemerintah Inggris, Argentina juga berusaha untuk menarik perhatian penduduk kepulauan Falkland/Malvinas dengan melakukan pendekatan yang halus seperti mengadakan dialog terbuka dengan penduduk kepulauan. Namun dibawah pemerintahan Kirchner Argentina mengalami pergeseran kebijakan luar negeri kearah yang lebih Agresif dan cenderung anti-Inggris. Kebijakan

Nestor dan Cristina Kirchner membuat hubungan diplomatik Argentina-Inggris kembali memanas. Argentina kembali melakukan tindakan keras terhadap penduduk kepulauan dengan cara menarik ijin penerbangan menuju kepulauan Falkland/Malvinas dengan tujuan agar Inggris bersedia melakukan perundingan dengan Argentina.

Argentina dalam forum PBB sering melakukan protes terhadap militerisasi Inggris terhadap kepulauan Falkland/Malvinas, dan meminta PBB untuk memberikan sanksi terhadap Inggris yang melakukan tindakan kolonialisme terhadap kepulauan Falkland/Malvinas. Banding Argentina ini merupakan banding lanjutan Argentina tahun 2010 atas tindakan eksplorasi minyak oleh Inggris di sekitar perairan Falkland/Malvinas.

Argentina dalam usahanya mendapatkan status kedaulatan atas kepulauan Falkland/Malvinas melakukan tiga (3) jenis pendekatan yaitu; *Co-option* dengan melibatkan negara-negara Amerika Selatan, Mengganggu kegiatan perekonomian penduduk Falkland/Malvinas, dan berusaha untuk mempromosikan kedaulatan Argentina atas Falkland/Malvinas dengan meminta bantuan tokoh-tokoh dan selebritis internasional. Dibawah pemerintahan Kirchner Argentina terus melakukan protes terhadap Inggris melalui forum kerjasama regional dan internasional. Hector Timmerman, Menteri Luar Negeri Argentina pada bulan Maret 2012 dalam pertemuan di Seoul menyatakan bahwa Inggris militerisasi Inggris di Falkland/Malvinas dengan mengirim kapal perang

nuklir di kepulauan tersebut telah melanggar perjanjian Tlatelolco yang menjamin bahwa Amerika Latin merupakan zona bebas senjata nuklir.

Klauss Dodds mengatakan bahwa strategi *co-option* Argentina mengandung dua makna yaitu; pertama, Argentina berusaha untuk memperoleh resolusi yang mendukung Argentina untuk menuntut Inggris agar bersedia menegosiasikan kedaulatan atas kepulauan Falkland/Malvinas. kedua, Argentina menggunakan forum internasional dan regional untuk mengkonsolidasikan dan meminta dukungan internasional atas tindakan Argentina dalam mendapatkan status kedaulatan kepulauan Falkland/Malvinas.

Disamping meminta bantuan kepada negara-negara Amerika Latin untuk mendesak Inggris agar bersedia melakukan perundingan, Argentina juga menekan Inggris melalui perekonomian, Argentina telah merancang tindakan untuk menghambat kegiatan perekonomian di kepulauan Falkland/Malvinas dengan cara melarang investor asing untuk berinvestasi di kepulauan Falkland/Malvinas. Tindakan pelemahan perekonomian penduduk Falkland/Malvinas juga dilakukan dengan cara menahan kapal berbendera Falkland/Malvinas yang melintasi wilayah perairan Argentina dan negara-negara Anggota MERCOSUR.

Upaya Argentina yang ketiga adalah melakukan menarik dukungan dunia Internasional dengan bekerjasama dengan tokoh-tokoh dan selebritis internasional, tindakan ini menurut Klauss Dodds dikategorikan sebagai geopolitik tokoh internasional. Dengan bekerja sama dengan tokoh dan

selebritis internasional Argentina berupaya untuk membangun opini masyarakat global bahwa kepulauan Falkland/Malvinas adalah wilayah kedaulatana Argentina.

Sean Penn salah satu aktor Hollywood pada saat berkunjung di Argentina tahun 2012 lalu menyatakan mengutuk keras tindakan kolonialisme Inggris di Falkland/Malvinas dan menyerukan agar penduduk kepulauan untuk bersedia mengakui kedaulatan Argentina. Argentina juga meminta dukungan dari Morrissey, penyanyi terkenal asal Inggris untuk mempromosikan hak kedaulatan Argentina atas kepulauan Falkland/Malvinas. Selain selebriti dunia Argentina juga meminta dukungan kepada tokoh-tokoh internasional seperti Paus Fransiskus untuk menghimbau kepada pemerintah Inggris agar bersedia mengadakan perundingan dengan pemerintah Argentina.

Dalam penelitiannya Klauss Dodds mengatakan bahwa pemerintahan Inggris tengah mengalami pertentangan dalam pembahasan masalah dana militer terutama masalah strategi pertahanan Inggris di wilayah seberang lautannya. Inggris di tahun 2010 telah mengkaji ulang strategi pertahanan keamanan negaranya. Inggris sebagai sebagai salah satu negara yang merasakan dampak krisis global, berniat untuk memangkas anggaran militer untuk menjaga keamanan wilayah seberang lautannya. Kebijakan Inggris untuk mengkaji ulang anggaran militer wilayah seberang lautannya, memberikan sinyal kepada pemerintah

Argentina bahwa Inggris tidak lagi memiliki komitmen untuk mempertahankan kedaulatannya di kepulauan Falkland/Malvinas.

Kekuatan militer Inggris di Falkland/Malvinas saat ini terdiri atas 1 unit infantri angkatan laut, empat (4) jet tempur Typhoon, sistem pertahanan rudal serta pesawat stasiun pengisian bahan bakar udara, serta helikopter penyelamat. Inggris juga mendapat bantuan dari sekutu yang tergabung dalam aliansi *The Atlantic Patrol Task South* (APTS) berupa kapal *Destroyer*. Kehadiran kapal *Destroyer* di perairan Argentina mendapat protes keras dari nelayan Argentina, namun kapal ini tetap mengadakan patroli tetap setiap bulan.

Media di Inggris memiliki peran besar dalam mempengaruhi protes masyarakat mengenai rencana Inggris untuk memangkas anggaran militer di wilayah seberang lautannya. Media Inggris secara berkala menyiarkan siaran mengenai agresi militer Argentina di kepulauan Falkland/Malvinas, dan menyiarkan wawancara dari veteran perang dan penduduk sipil sebagai saksi perang Falkland/Malvinas. Siaran media Inggris yang provokatif ini berdampak pada protes masyarakat kepada pemerintah yang didasari oleh ketakutan bahwa Argentina akan kembali melakukan invasi militer di Falkland/Malvinas jika Inggris mengurani penjagaannya di kepulauan itu.

Menanggapi protes rakyatnya, pemerintah Inggris menyatakan bahwa Inggris saat ini memfokuskan pertahanan kepulauan Falkland/Malvinas di sektor angkatan udara, dan menyatakan bahwa saat

ini pemerintah angkatan udara Argentina tidak dapat menandingi jet tempur Typhoon milik Inggris, wakil Menteri pertahanan Inggris, Gerald Howarth menegaskan Argentina sebagai anggota PBB tidak akan mengulangi menginvasi kepulauan Falkland/Malvinas.

Inggris akan tetap mengurangi jumlah angkatan militer di Inggris namun Inggris tetap menjaga keseimbangan militer di Falkland/Malvinas dengan memodernisasi teknologi pertahanan Inggris di kepulauan itu.

B. Sengketa Kepulauan Falkland/Malvinas.

M. Imad Khan juga menulis Jurnal mengenai sengketa di kepulauan Falkland/Malvinas yang di terbitkan oleh *American Bar Association*, dengan judul *Reemergence of the Falkland Islands Territorial Dispute*. penelitian Khan menyimpulkan bahwa Kepulauan Falkland/Malvinas secara historis merupakan wilayah sengketa yang melibatkan banyak negara. Namun beberapa negara telah melepaskan klaimnya terhadap kepulauan Falkland/Malvinas. Argentina dan Inggris merupakan negara yang masih terlibat sengketa wilayah di Falkland/Malvinas. Sengketa kedua negara berkembang dari perebutan status kedaulatan menjadi perebutan kendali atas sumber daya di kepulauan Falkland/Malvinas.

Cadangan minyak Falkland/Malvinas menurut survey *British Geological Society* mencapai lebih dari 60 miliar barrel. Penemuan fakta mengenai cadangan minyak yang melimpah ini yang menjadi pemicu memanasnya kembali sengketa kedaulatan kedua negara. Cadangan minyak yang besar membuat beberapa perusahaan eksplorasi Inggris dan

Amerika Serikat tetap berinvestasi di Falkland/Malvinas walaupun wilayah tersebut sedang disengketakan.

Dalam tulisannya Khan menyebutkan bahwa menurut hukum internasional, hak untuk menentukan nasib sendiri tidak termasuk sebagai salah satu penyebab negara dapat memperoleh atau kehilangan hak atas sebuah wilayah. Namun dalam sengketa Argentina-Inggris hak penentuan nasib sendiri digunakan oleh Inggris untuk menyelesaikan sengketa wilayah dengan Argentina.

Dalam deklarasi prinsip-prinsip hukum internasional tahun 1970 disebutkan bahwa sebuah wilayah yang berpenduduk dapat memilih untuk bergabung dengan negara lainnya atau memisahkan diri. Kebebasan untuk menentukan nasib sendiri merupakan hak politik dari masing-masing penduduk dan negara harus memperhatikan hak tersebut.

Dalam kasus Falkland/Malvinas belum jelas apakah warga yang menetap di kepulauan tersebut dapat dikategorikan sebagai “penduduk” atau tidak. Jika dikategorikan sebagai “penduduk” maka warga kepulauan Falkland/Malvinas berhak untuk menentukan nasib politiknya sendiri.

Menurut PBB ada dua elemen penting sehingga sebuah wilayah yang dihuni oleh beberapa orang, dapat dikategorikan sebagai penduduk yaitu:

- (1) Populasi dengan identitas yang jelas dan karakteristik yang unik dan
- (2) memiliki hubungan dengan suatu wilayah. warga Falkland/Malvinas tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai “penduduk”.

Walaupun warga tersebut memiliki identitas sebagai warga dengan

kesamaan budaya dengan Inggris dan berbahasa resmi Inggris, namun secara geografis wilayah mereka berbeda jauh dari Inggris. Alasan utama warga Falkland/Malvinas tidak mendapatkan hak untuk menentukan nasib sendiri adalah karena warga tersebut digolongkan sebagai keturunan pemukin bukan sebagai masyarakat adat yang ditundukkan oleh kolonial.

Penyelesaian sengketa wilayah antara Inggris dan Argentina menjadi semakin rumit karena sengketa wilayah ini belum dapat diselesaikan melalui Mahkamah Internasional. Argentina belum mengakui yuridiksi dari Mahkamah Internasional sehingga penyelesaian sengketa wilayah tidak dapat melalui badan Mahkamah Internasional. Menurut Ban Ki-moon penyelesaian sengketa antara Inggris dan Argentina hanya dapat terjadi jika kedua negara menyelesaikan melalui perundingan atau menyerahkan masalah tersebut ke badan peradilan internasional.

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Leonardo Arcadio Zarza, yang diterbitkan oleh *School of Advanced Military Studies*. Arcadio Zarza mencoba untuk menjelaskan konflik Inggris-Argentina dari perspektif Argentina. Menurut perspektif Argentina, perang 1982 bukanlah sebuah invasi militer namun usaha untuk mempertahankan kedaulatan wilayah negara. Dalam pandangan Argentina kepulauan Falkland/Malvinas, Georgia, dan Sandwich Selatan masih bagian dari landas kontinental Amerika Selatan dan masih terletak dalam

wilayah laut Argentina. Kemenangan Inggris atas Argentina tahun 1982 tidak mengubah perspektid Argentina mengenai Falkland/Malvinas. Tujuan Argentina berperang adalah untuk mencapai perdamaian jangka panjang, karena Inggris terus melakukan pendudukan yang tidak sah di wilayah Argentina.

Konstitusi Argentina tahun 1994 menyatakan bahwa sengketa Falkland/Malvinas adalah kebijakan negara. Kebijakan mengenai apapun bentuk tindakan Argentina untuk mendapatkan kedaulatan atas Falkland/Malvinas merupakan tanggung jawab negara. Argentina tetap menghormati hak-hak penduduk yang telah menetap di kepulauan dan bersedia menjadikan penduduk Falkland/Malvinas sebagai warga negara Argentina.

Pada tahun 1995 Argentina dan Inggris menandatangani kesepakatan kerjasama eksplorasi minyak, yang membuat hubungan diplomatik kedua negara sempat membaik. Namun pada tahun 2007 Nestor Kirchner membatalkan kerjasama tersebut karena kurangnya tranparansi selama berlangsungnya kerjasama dan keputusan sepihak pemerintah Inggris dalam eksplorasi minyak. Inggris kemudian merespon pembatalan kerjasama ini dengan memberikan konstitusi baru bagi penduduk Falkland/Malvinas, sehingga pemerintah Falkland/Malvinas diberikan kebebasan untuk mengatur perekonomian secara mandiri.

Inggris juga dalam pertemuan di Lisbon tahun 2009 berhasil mengajak anggota Uni Eropa untuk menyatakan bahwa Falkland/Malvinas

merupakan bagian dari wilayah Eropa. Argentina merespon tindakan Inggris dengan melakukan protes terhadap PBB dan Uni Eropa mengenai deklarasi Lisbon tersebut. Argentina juga berhasil mengajak MERCOSUR dan UNASUR untuk menjadikan masalah sengketa Falkland/Malvinas sebagai masalah yang harus diselesaikan bersama oleh negara Amerika Selatan.

Sengketa antara kepulauan Inggris dan Argentina mengenai statu kedaulatan atas Falkland/Malvinas juga diteliti oleh Matthew C. Benwell dan Klaus Dodds. Dalam tulisan yang diterbitkan oleh *Elsevier*, keduanya memfokuskan bahwa perlu adanya peninjauan kembali mengenai kedaulatan wilayah Argentina atas Falkland/Malvinas.

Hasil penelitian Benwell dan Dodds menyatakan bahwa; setiap tahun di bulan April, Media Argentina selalu menayangkan acara seputar perang Falkland/Malvinas untuk memperingati invasi militer Argentina di kepulauan tersebut. Media Argentina secara serempak menyiarkan film dokumenter mengenai konflik 1982 dan mewawancarai para veteran perang dan penduduk sipil yang ikut terlibat dalam perang Falkland/Malvinas. Penayangan film dokumenter ini bertujuan untuk mengingatkan penduduk Argentina bahwa tujuan Argentina menginvasi kepulauan Falkland/Malvinas sebagai salah satu bentuk kepentingan nasional Argentina untuk mempertahankan eksistensi wilayahnya.

Peringatan invasi militer Argentina di Falkland/Malvinas kembali memanas sejak tahun 2010, akibat memburuknya hubungan diplomatik

Argentina-Inggris pasca Inggris memberikan ijin kepada perusahaan minyak untuk melakukan eksplorasi di perairan Falkland/Malvinas. Cristina Fernandez pada peringatan perang Falkland/Malvinas di tahun 2010 menyatakan bahwa eksplorasi minyak yang dilakukan oleh perusahaan Inggris di Falkland/Malvinas telah melanggar kedaulatan Argentina di perairan Falkland/Malvinas.

Penduduk Argentina sendiri menurut survey yang dilakukan oleh Polarquia Consultores di tahun 2010 terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang menganggap isu Falkland/Malvinas sebagai isu yang sangat penting sekitar 52% dan kelompok yang tidak memperhatikan isu kedaulatan Falkland/Malvinas sebesar 45%. Dari kelompok yang menganggap isu Falkland/Malvinas merupakan isu yang penting lebih dari 50% pemilih berjenis kelamin pria. data ini menunjukkan bahwa kelompok pria dari rentang usia 18-29 tahun merupakan kelompok yang menganggap isu Falkland/Malvinas adalah kasus kedaulatan negara, dan kepulauan Falkland/Malvinas harus dipertahankan.

Argentina sebagai salah satu negara bekas jajahan kolonial Spanyol, berusaha untuk menghormati keberadaan dan hak-hak dari penduduk Falkland/Malvinas dengan cara berusaha untuk membuat penduduk kepulauan merasa menjadi bagian dari negara Argentina. Di setiap siaran-siaran media massa Argentina, Pemerintah mewajibkan agar media menyapa penduduk Falkland/Malvinas sebagai bagian dari wilayah Argentina. Pemerintah juga mengirim kartu ucapan natal kepada penduduk

Falkland/Malvinas di bulan Desember setiap tahun. Argentina berharap dengan sikap ramah pemerintah Argentina ini, penduduk Falkland/Malvinas dapat merasa menjadi bagian dari Argentina.

Selain berusaha untuk membuat penduduk Falkland/Malvinas merasa menjadi bagian dari Argentina. Kirchner juga aktif meminta dukungan dari negara-negara anggota PBB secara khusus negara yang berada di wilayah Amerika Latin. Pada tahun 2010 ketika berpidato di dalam pertemuan CALC, Kirchner memprotes perusahaan Inggris yang melakukan eksplorasi di perairan Falkland/Malvinas dan menyebut PBB kurang tegas dalam menangani sengketa kepulauan antara Inggris dan Argentina.

Davide Borsani juga mengadakan penelitian dalam penanganan sengketa kepulauan Falkland/Malvinas. Namun dalam penelitiannya Borsani lebih memfokuskan pada mengapa kepulauan Falkland/Malvinas sangat penting bagi Argentina dan Inggris. Penelitian Borsani ini di terbitkan oleh *Intituto Per Gli Studi Di Politica Internazionale*.

David Cameron, pada bulan Juni 2012 mengumumkan referendum di Falkland/Malvinas mengenai status politik Inggris di kepulauan Falkland/Malvinas. Dengan mengadakan referendum, Inggris bertujuan untuk meredakan konflik kedaulatan dengan Argentina. Referendum Inggris di kepulauan Falkland/Malvinas ditolak oleh pemerintah Argentina. Argentina menyatakan bahwa referendum Inggris di kepulauan

Falkland/Malvinas tidak akan menyelesaikan sengketa wilayah namun justru akan memperkeruh hubungan diplomatik kedua negara.

Menurut Argentina keinginan penduduk pulau, bukanlah menjadi tujuan utama Argentina, karena penduduk merupakan penduduk Inggris yang mendiami wilayah kedaulatan Argentina. Sengketa kepulauan hanya dapat diselesaikan jika Inggris bersedia melakukan diskusi bilateral.

Tulisan Sergio Romani pada *Corriere della Sera* menjelaskan bahwa Inggris dan Argentina memiliki persepsi yang berbeda mengenai konsep kedaulatan. Menurut Argentina konsep kedaulatan wilayah adalah tanah, air, dan udara yang berada di dalam batas wilayahnya, sedangkan menurut kedaulatan menurut pemerintah Inggris, kedaulatan wilayah adalah tanah, air, dan udara yang dihuni oleh warga negara Inggris.

Kedaulatan atas kepulauan Falkland/Malvinas akan selalu menjadi prioritas utama Argentina, usaha Argentina untuk mendapatkan kedaulatan atas Falkland/Malvinas karena terkait dengan posisi pemerintah di mata masyarakat Argentina dan juga di luar negeri. Pemerintah Argentina yakin bahwa pada abad ke-19 Kerajaan Inggris secara tidak sah menyita kepulauan Falkland/Malvinas dan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk merebut kembali kepulauan Falkland/Malvinas. Selain itu, popularitas Cristina Kirchner juga tengah menurun, dan Argentina tengah mengalami ancaman kerusuhan sosial akibat perekonomian Argentina yang memburuk. Usaha pemerintah Argentina untuk memperbaiki perekonomiannya masih belum berhasil. Kepercayaan bisnis yang masih

kurang di Argentina menjadi penyebab berkurangnya investasi asing di Argentina.

Cadangan minyak bumi di kepulauan Falkland/Malvinas yang diperkirakan lebih dari 8 miliar barel, menjadi opsi pemerintah Argentina untuk memperbaiki perekonomiannya. Jika Argentina mampu mengontrol produksi minyak bumi Falkland/Malvinas secara eksklusif maka akan mengubah ekonomi dunia dan posisi Argentina di dunia Internasional.

Selain itu dari sisi regional, Jika Argentina berhasil mendapatkan kedaulatan atas kepulauan Falkland/Malvinas maka akan menjadi sebuah presitse yang berharga bagi Argentina. Munculnya Brasil sebagai salah satu kompetitor Argentina dalam memimpin negara-negara Amerika Latin, memberikan tekanan kepada Argentina. Jika berhasil mendapatkan status kedaulatan kepulauan Falkland/Malvinas akan menunjukkan ketegasan Argentina di dunia regional dan internasional, dan menjadi bukti bahwa Argentina mampu menjadi pemimpin negara-negara Amerika Latin dalam melawan kekuasaan Barat.

Kelima penelitian yang penulis lampirkan dalam bab II ini memiliki fokus penelitian yang berbeda dengan penulis. Namun penelitian tersebut membantu penulis dalam penyelesaian penelitian penulis. penelitian yang dilakukan oleh Klauss Dodds dan Borsani Imad Khan, lebih terfokus kepada penyebab hubungan diplomatik Inggris-Argentina kembali memanas. Sedangkan dalam penelitian Zarza berfokus pada bagaimana Argentina melihat dan memposisikan dirinya sebagai salah satu aktor yang

terlibat langsung dalam sengketa kepulauan. Dalam penelitiannya Borsani berfokus kepada nilai strategis kepulauan Falkland/Malvinas bagi Argentina dan Inggris.

BAB III

ARGENTINA DAN INGGRIS DALAM PERMASALAHAN

KEPULAUAN FALKLAND/MALVINAS

A. Kepulauan Falkland/Malvinas

Kepulauan Falkland/Malvinas merupakan gugusan pulau yang terdiri dari dua pulau besar, Falkland/Malvinas barat dan Falkland/Malvinas Timur berada di wilayah selatan samudera atlantik yang secara geografis merupakan bagian dari wilayah Amerika selatan. Kondisi geografis kepulauan Falkland/Malvinas memiliki kontur berbatu, perbukitan serta rawa, dengan luas wilayah sekitar 12,173 km². Penduduk di kepulauan ini sampai pada tahun 2012 berjumlah sekitar 3,135 jiwa, dengan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi kepulauan Falkland/Malvinas. Kelompok etnis yang tinggal di kepulauan ini terdiri atas; Falkland/Malvinas 61,3% Britania 29,0% Spanyol 2,6% Jepang 0,6% Chili dan lain-lain 6,5%. bahasa Inggris merupakan bahasa resmi kepulauan Falkland/Malvinas. Agama mayoritas penduduk kepulauan Falkland/Malvinas adalah agama Kristen Protestan sebesar 66%, kelompok Atheis sebesar 32% dan sebesar 2% merupakan kelompok kepercayaan lainnya.

Secara historis, kepulauan Falkland/Malvinas telah menjadi wilayah sengketa sejak abad ke-15. Kepulauan Falkland/Malvinas pertama kali ditemukan pada tahun 1522 oleh John Davis, karena memiliki lokasi yang strategis John Amstrong menetapkan pulau ini sebagai pangkalan laut kerajaan Britania Raya pada tahun 1776. Kepulauan ini kemudian

ditinggalkan oleh Inggris, ketika Inggris membangun koloni di Amerika Utara. Perancis merupakan Imperium pertama yang memiliki kepulauan Falkland/Malvinas secara *de facto*. Pada tahun 1764, Louis Antoine de Bougainville membangun koloni di pulau Falkland/Malvinas Timur dengan mengirim sekitar 250 warga Perancis, 1766 Perancis sepakat meninggalkan kepulauan Falkland/Malvinas setelah kepulauan ini dibeli oleh Spanyol.³⁶

Kepulauan Falkland/Malvinas kemudian diperebutkan oleh Spanyol dan Portugis untuk dijadikan sebagai wilayah pangkalan militer. Spanyol dan Portugis kemudian sepakat untuk membagi dua wilayah kekuasaan atas Falkland/Malvinas melalui perjanjian Utrecht. Pada tahun 1767 Inggris kembali bersengketa dengan Spanyol mengenai status kepemilikan pulau Falkland/Malvinas, kedua imperium ini kembali bersengketa atas status pulau Falkland/Malvinas karena pulau Falkland/Malvinas sangat strategis untuk dijadikan pangkalan laut, jika terusan Panama selesai dibangun.³⁷ Sengketa kedua imperium ini berakhir ketika pada tahun 1770 Spanyol berhasil mengalahkan Inggris dan secara *de facto* menjadi pemilik kepulauan Falkland/Malvinas dengan mengangkat Ramon de Carassa sebagai Gubernur atas Kepulauan Falkland/Malvinas.³⁸

³⁶ *Instrumento que otorgó M. Bougainville para la entrega de las Malvinas* diakses dari servicios.abc.gov.ar/docentes/efemerides/2deabril/descargas/historia/bouganville.pdf diakses pada tanggal 10 oktober 2013

³⁷ *Ibid*

³⁸ Mary Cawell, *The Falkland/Malvinas Story 1952-1982*, Anthony Nelson Limited 1983 diambil dari <http://pdfcast.org/paid/9780904614084> diakses pada tanggal 05 oktober 2013

Ketika Argentina mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol pada tahun 1816 Argentina mengklaim seluruh wilayah jajahan Spanyol di Amerika Selatan sebagai wilayah negaranya. Inggris mengakui kemerdekaan Argentina tahun 1825 namun tidak mengakui seluruh wilayah kedaulatan Argentina. Inggris menganggap bahwa kepulauan Falkland/Malvinas bukan sebagai wilayah kedaulatan Argentina. Tahun 1833 Inggris dibawah komando Kapten James Onslow merebut kepulauan Falkland/Malvinas dari kekuasaan Argentina. Agresi militer Inggris terhadap Argentina inilah yang menjadi awal sengketa wilayah kedua negara sampai sekarang. Argentina pada tahun 1983 sempat menginvasi kepulauan Falkland/Malvinas, namun Inggris berhasil merebut kembali kepulauan tersebut setelah berhasil memenangkan perang Falkland/Malvinas

Status Kepulauan Falkland/Malvinas saat ini oleh PBB ditetapkan sebagai wilayah sengketa, antara pemerintah Inggris dan Argentina, namun menurut laman resmi kepulauan Falkland/Malvinas pemerintahan daerah kepulauan Falkland/Malvinas berada di bawah pemerintahan ratu Elizabeth sebagai kepala negara kerajaan Inggris raya, sistem pemerintahan kepulauan ini berbentuk monarki konstitusional dengan gubernur yang bertugas sebagai perwakilan ratu Inggris raya di kepulauan Falkland/Malvinas, Gubernur bertugas untuk menunjuk kepala eksekutif yang bertugas sebagai kepala pemerintahan di kepulauan Falkland/Malvinas. susunan kabinet kepulauan Falkland/Malvinas terdiri

dari 6 anggota yaitu Gubernur, 2 anggota ex officio (kepala eksekutif dan sekretaris keuangan), dan 3 anggota kabinet pilihan dewan legislatif. pemilihan legislatif di kepulauan Falkland/Malvinas diadakan setiap 4 tahun sekali, anggota legislatif berjumlah 10 orang terdiri dari 2 ex-officio dan 8 anggota legislatif terpilih melalui pemilihan umum, tidak ada partai politik di kepulauan ini semua anggota dewan terpilih melalui jalur independen. Pemerintah kepulauan Falkland/Malvinas menjadikan 14 Juni 1983 sebagai hari kemerdekaan.

Ibukota wilayah daerah kepulauan Falkland/Malvinas adalah kota Stanley. kota Stanley yang berada di Pulau Falkland/Malvinas timur, merupakan kota terbesar di kepulauan Falkland/Malvinas, menurut sensus penduduk sekitar 75% penduduk menetap di Stanley. Karena memiliki penduduk yang besar Stanley memiliki perwakilan terbanyak dalam legislatif yaitu lima (5) perwakilan. Pemerintah Falkland/Malvinas mempunyai kantor *Falkland/Malvinas office* di London, yang bertugas sebagai media komunikasi dan informasi kepulauan Falkland/Malvinas kepada warga Inggris.

Dalam bidang pertahanan keamanan kepulauan Falkland/Malvinas tidak memiliki militer reguler sebagai pertahanan, sebagai wilayah yang terdaftar dalam koloni Inggris sejak tahun 1833, pemerintah Inggris bertanggung jawab dalam masalah keamanan militer kepulauan Falkland/Malvinas. pemerintah Inggris secara berkala mengirim angkatan militer di kepulauan Falkland/Malvinas untuk menjaga keamanan dan

kedaulatan kepulauan Falkland/Malvinas. Militer Inggris yang bertugas untuk mengamankan kepulauan Falkland/Malvinas bernama *British Forces South Atlantic Islands*, merupakan gabungan militer kerajaan Inggris yang terdiri dari *British Army*, *Royal Air Force* dan *Royal Navy*.³⁹ *British Forces South Atlantic Islands* adalah bagian dari Kementerian Pertahanan Inggris. Tugas *British Forces South Atlantic Islands* adalah untuk melindungi wilayah koloni Inggris yang berada di wilayah samudera Atlantik selatan, yang terdiri dari pulau Sandwich selatan, Georgia selatan, dan kepulauan Falkland/Malvinas.

Industri terbesar di kepulauan ini adalah industri perikanan berupa ikan, cumi-cumi, rumput laut berkualitas. Pemerintah kepulauan Falkland/Malvinas sejak tahun 1987 menjual izin melakukan penangkapan ikan bagi kapal pengangkap ikan asing untuk menangkap ikan di ZEE kepulauan Falkland/Malvinas dengan biaya sebesar 40 juta Dollar setiap tahun. Industri peternakan berupa peternakan domba dan pariwisata juga merupakan industri yang diminati oleh penduduk dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Kepulauan Falkland/Malvinas juga memiliki cadangan minyak yang besar namun belum dieksploitasi, cadangan minyak di Falkland/Malvinas dapat memproduksi minyak sebesar 500.000 barrel per hari, perusahaan eksplorasi Inggris pada tahun 2011 telah mengumumkan bahwa akan memulai eksplorasi minyak pada tahun 2016. Komoditas ekspor terbesar dari kepulauan ini adalah benang wool kualitas terbaik

³⁹ GOV.UK diambil dari <https://www.gov.uk/british-forces-overseas-Falkland/Malvinas-islands-and-ascension-island#more-like-this> diakses pada tanggal 07 oktober 2013

dengan Inggris sebagai mitra dagang terbesarnya, kepulauan Falkland/Malvinas juga mendapat pendapatan ekonomi yang cukup besar dari penjualan perangkai dan koin. Komoditas impor kepulauan Falkland/Malvinas berupa bahan bakar, bahan pangan, dan pakaian.

Kepulauan Falkland/Malvinas merupakan kepulauan yang oleh Komite Dekolonisasi PBB masuk dalam daftar 16 wilayah jajahan. Oleh PBB kepulauan Falkland/Malvinas dikategorikan sebagai *non-self governing territory* berarti pemerintahan kepulauan Falkland/Malvinas bertanggung jawab atas semua urusan pemerintahan dalam negeri kecuali urusan hubungan luar negeri dan pertahanan yang merupakan tanggung jawab pemerintah Inggris sebagai *self-governing overseas territory* Inggris. Walaupun secara administratif kepulauan ini merupakan bagian dari koloni Inggris, namun Argentina juga ikut mengklaim kepemilikan atas kepulauan Falkland/Malvinas.⁴⁰

Pada tanggal 10 Oktober 1989 telah terjadi kesepakatan *sovereignty umbrella* antara kedua pemerintah, kesepakatan ini menyatakan bahwa Argentina tidak diperbolehkan untuk menuntut Inggris untuk membahas mengenai kedaulatan kepulauan Falkland/Malvinas.⁴¹ Namun dibawah pemerintahan Néstor Kirchner pada tahun 2003 hubungan diplomatik kedua negara kembali merenggang karena Néstor Kirchner membatalkan perjanjian *sovereignty umbrella* dan menginginkan Argentina dan Inggris

⁴⁰CIA World Fact Book diambil dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fk.html> diakses pada tanggal 08 Oktober 2013

⁴¹ Vicente Palermo, *In Search of Common Good*, 2011, hal 4

kembali membahas mengenai kedaulatan kepulauan Falkland/Malvinas . Kebijakan Argentina dengan menghentikan ijin penerbangan menuju kepulauan Falkland/Malvinas dan mengangkat kembali isu kedaulatan Falkland/Malvinas di forum internasional seperti *Organization of American States* (OAS) dan PBB membuat hubungan Argentina – Inggris kembali memanas.

Pemerintah Inggris pada bulan maret 2013 telah mengadakan referendum kepada penduduk kepulauan Falkland/Malvinas yang mempertanyakan tentang apakah penduduk Falkland/Malvinas masih ingin menjadi bagian teritori seberang lautan Inggris. Referendum ini dihadiri oleh pengamat internasional untuk mengawasi proses referendum yang terdiri dari Kanada, Cile, Meksiko, Selandia Baru, Paraguay, Amerika Serikat, dan Uruguay.

Sekitar 1513 warga dari 1650 warga Falkland/Malvinas yang diminta untuk memberikan jawaban, setuju tetap menjadi bagian wilayah Inggris. Hasil referendum yang menyatakan bahwa warga Falkland/Malvinas masih ingin menjadi bagian teritorial Inggris di seberang lautan di tolak oleh pemerintah Argentina. Presiden Argentina Cristina Kirchner dengan tegas menolak hasil referendum kepulauan Falkland/Malvinas tersebut, menurut Argentina referendum tersebut tidak sah karena tidak diadakan oleh PBB, dan warga Falkland/Malvinas bukan

penduduk asli kepulauan tersebut, tapi warga Inggris yang dipindahkan ke Malvinas.⁴²

B. Kepentingan Inggris di kepulauan Falkland/Malvinas

Inggris adalah negara yang memiliki beberapa wilayah koloni yang tersebar di seluruh dunia. koloni tersebut merupakan wilayah jajahan Inggris yang belum mendapatkan kemerdekaannya atau telah memilih untuk tetap menjadi bagian dari wilayah Inggris. Wilayah koloni Inggris ini menurut undang-undang *British Overseas Territories Act* pada tahun 2002 yang menggantikan undang-undang *British Nationality Act* disebut sebagai *British Overseas Territories* (Wilayah Seberang Laut Britania). Wilayah seberang laut Britania terdiri atas 14 wilayah yang walaupun tidak berada dalam wilayah Britania raya namun tetap berada dalam yuridiksi Inggris. Wilayah koloni Inggris tersebut memiliki pemerintahan sendiri dan bertanggung jawab atas semua urusan pemerintahan dalam negeri kecuali urusan hubungan luar negeri dan pertahanan yang merupakan tanggung jawab pemerintah Inggris sebagai negara Induk.⁴³

Kepulauan Falkland/Malvinas merupakan salah satu wilayah seberang laut Britania yang berada di Samudera Atlantik Selatan. Inggris telah mengklaim kepulauan Falkland/Malvinas menjadi wilayah koloni

⁴² The Guardian diambil dari <http://guardian.co.tt/news/2013-03-20/ambassador-tt-argentina-rejects-Falkland/Malvinas-referendum> diakses pada tanggal 09 Oktober 2013

⁴³ European Archieve diambil dari <http://collections.europarchive.org/tna/20080205132101/www.fco.gov.uk/servlet/Front%3fpagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1013618138295> diakses pada tanggal 09 oktober 2013

sejak tahun 1690, namun secara *de facto* Inggris menyatakan kedaulatannya terhadap Falkland/Malvinas sejak tahun 1833. pemerintahan Inggris memasukkan kepulauan Falkland/Malvinas dalam undang-undang *British Nationality Act* sebagai wilayah seberang pulau Inggris.⁴⁴

Kepulauan Falkland/Malvinas telah diperebutkan oleh beberapa negara sejak abad ke-18, ketika negara-negara di Eropa masih berbentuk imperium. Perancis, Spanyol dan Britania Raya (Inggris) merupakan kerajaan yang memperebutkan Falkland/Malvinas.⁴⁵ Pada tahun 1764 Perancis mendirikan pangkalan angkatan laut di Port Louis, Falkland/Malvinas Timur. Britania Raya juga ikut mendirikan pangkalan angkatan laut di Port Egmont, Falkland/Malvinas Barat pada 1765. Pada tahun 1766 Perancis menjual Falkland/Malvinas Timur kepada Spanyol. Tahun 1770 Spanyol dan Inggris berperang untuk mendapatkan kepulauan Falkland/Malvinas secara keseluruhan, perang ini berakhir dengan perjanjian Spanyol menguasai Falkland/Malvinas timur dan Britania raya menguasai Falkland/Malvinas Barat.⁴⁶

Perang Inggris dan Argentina pada tahun 1982 dalam memperebutkan Falkland/Malvinas merupakan puncak dari sengketa

⁴⁴ The British Empire diambil dari <http://www.britishempire.co.uk/forces/armycampaigns/southamerica/Falkland/Malvinass/Falkland/Malvinasswar.htm> diakses pada tanggal 10 oktober 2013

⁴⁵ The British Empire diambil dari <http://www.britishempire.co.uk/maproom/Falkland/Malvinas.htm> diakses pada tanggal 10 oktober 2013

⁴⁶ Falkland/Malvinass Island Government diambil dari <http://www.Falkland/Malvinass.gov.fk/our-people/our-history/> diakses pada tanggal 10 oktober 2013

wilayah kedua negara. Inggris dibawah pemerintahan Margaret Thatcher memutuskan untuk melakukan aksi militer dalam perebutan kepulauan Falkland/Malvinas yang telah diinvasi oleh militer Argentina. Keputusan Margaret Thatcher untuk berperang melawan Argentina mendapat banyak tantangan dari kabinet Inggris, Menteri Luar Negeri Inggris Lord Carrington lebih memilih agar Inggris melakukan perundingan daripada aksi militer. Pertentangan dalam kabinet Inggris tentang invasi Argentina di kepulauan Falkland/Malvinas terjadi karena negara Inggris pada tahun 1982 ikut mengalami krisis ekonomi global, Inggris pada saat itu mengalami inflasi hingga 18%.⁴⁷

Pertentangan di kabinet Inggris pada 1982 berakhir dengan mundurnya Lord Carrington dari jabatan Menteri Luar Negeri Inggris. Margaret Thatcher tetap memutuskan untuk berperang dengan Argentina untuk memperebutkan Falkland/Malvinas.⁴⁸ Perang perebutan kedaulatan antara kedua negara terjadi selama dua bulan dan menewaskan sekitar 1000 tentara,⁴⁹ Perang Falkland/Malvinas berakhir dengan kemenangan Inggris.

Kemenangan Inggris atas Argentina dalam perang memperebutkan kepulauan Falkland/Malvinas memberikan dampak positif bagi

⁴⁷ The Economist diambil dari <http://www.economist.com/node/21551493> diakses pada tanggal 11 Oktober 2013

⁴⁸ The British Empire diambil dari <http://www.britishempire.co.uk/forces/armycampaigns/southamerica/Falkland/Malvinass/Falkland/Malvinasswar.htm> diakses pada tanggal 10 oktober 2013

⁴⁹ Globalsecurity, diambil dari <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/malvinas.htm> diakses pada tanggal 15 juli 2013

perekonomian Inggris. Inflasi yang mencapai 18% mampu dipotong hingga 8,6% meski angka pengangguran di Inggris pada saat itu mencapai 3 juta orang.⁵⁰ Kemengan Inggris dalam perang Falkland/Malvinas juga memberikan dampak positif bagi Margaret Thatcher. Kinerja Thatcher yang dinilai sempat menurun akibat kebijakan menaikkan pajak di Inggris akibat krisis ekonomi, mendapat pujian dari rakyat Inggris karena dapat mengatasi masalah invasi Argentina dan juga mampu memperbaiki ekonomi Inggris.⁵¹ Margaret Thatcher terpilih kembali menjadi Perdana Menteri Inggris untuk periode kedua dengan tugas mengembalikan ekonomi Inggris melewati krisis ekonomi.

Setelah berhasil menggagalkan invasi Argentina di kepulauan Falkland/Malvinas, Inggris mengirim rakyatnya untuk menetap di Falkland/Malvinas.⁵² Tujuan Inggris mengirim rakyatnya ke Falkland/Malvinas untuk mendiami dan mengolah kekayaan alam Falkland/Malvinas dan juga sebagai bukti kepada masyarakat internasional bahwa Inggris sebagai pemilik resmi kepulauan falkand terus memperhatikan dan menjaga kedaulatannya di kepulauan tersebut. dalam undang-undang *British Overseas Territories Act* kepulauan Falkland/Malvinas sebagai wilayah seberang lautan Inggris diberikan hak

⁵⁰ The Economist diambil dari <http://www.economist.com/node/21551493> diakses pada tanggal 11 Oktober 2013

⁵¹ The British Empire diambil dari <http://www.britishempire.co.uk/forces/armycampaigns/southamerica/Falkland/Malvinass/margareththatcher.htm> diakses pada tanggal 11 oktober 2013

⁵² Falkland/Malvinass Island Government diambil dari <http://www.Falkland/Malvinass.gov.fk/our-people/our-history/> diakses pada tanggal 11 oktober 2013

untuk memiliki pemerintahannya sendiri dan berhak mengatur segala urusan dalam wilayah Falkland/Malvinas, kecuali hubungan dengan negara lain serta masalah pertahanan merupakan tanggung jawab pemerintah Inggris.⁵³

Perusahaan pertambangan asal Inggris telah menemukan cadangan minyak besar yang berada di kepulauan Falkland/Malvinas. Cadangan minyak Falkland/Malvinas yang dapat memproduksi minyak sebesar 500.000 barrel per hari, hingga saat ini belum di eksplorasi.⁵⁴ Perusahaan eksplorasi Inggris pada tahun 2011 telah mengumumkan bahwa akan memulai eksplorasi minyak di Falkland/Malvinas pada tahun 2016.

Falkland/Malvinas sejak tahun 1982 selalu memberikan dampak positif bagi pemerintah Inggris, perang Falkland/Malvinas secara tidak langsung mampu mendongkrak perekonomian Inggris. Setelah diketahui bahwa Falkland/Malvinas memiliki cadangan minyak, Inggris mempunyai kepentingan untuk tetap mempertahankan Falkland/Malvinas sebagai teritori seberang lautannya, untuk mempermudah eksplorasi minyak oleh perusahaan Inggris di wilayah Falkland/Malvinas.

C. Kepentingan Argentina di kepulauan Falkland/Malvinas

Argentina merupakan negara bekas jajahan Spanyol di semenanjung barat benua Amerika Selatan yang memperoleh kemerdekaan ditahun 1819. Argentina sebagai negara bekas jajahan Spanyol mengambil wilayah

⁵³ *op.cit.*

⁵⁴ BBC diambil dari http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2010/02/100223_Falkland/Malvinassoil.shtml diakses pada tanggal 11 oktober 2013

bekas jajahan Spanyol di Amerika Selatan sebagai bagian dari wilayah negara Argentina. Malvinas yang juga merupakan bagian dari wilayah Spanyol di wilayah Amerika Selatan diklaim sebagai bagian dari wilayah Argentina.

Klaim Argentina terhadap kepulauan Malvinas selain karena faktor sejarah juga karena faktor geografis. secara geografis kepulauan Malvinas berada dekat dengan negara Argentina yaitu sekitar 480 Km di sebelah barat Argentina. Argentina menganggap Inggris yang memiliki pusat pemerintahan di benua Eropa tidak mungkin memiliki wilayah di sekitar benua Amerika. Malvinas yang secara geografis merupakan bagian dari benua Amerika merupakan bagian dari Argentina.

Argentina dalam konstitusi negaranya memasukkan Malvinas sebagai bagian dari wilayah negaranya, walaupun secara administratif Falkland/Malvinas merupakan wilayah teritorial seberang laut Inggris.⁵⁵ Argentina telah meminta bantuan kepada PBB untuk menyelesaikan sengketa antara kedua, namun usaha untuk mengadakan perundingan membahas mengenai kedaulatan kepulauan Falkland/Malvinas ditolak oleh pemerintah Inggris.⁵⁶

Kepulauan Falkland/Malvinas memiliki arti penting bagi rakyat Argentina, masalah kedaulatan Malvinas merupakan masalah yang sangat sensitif bagi penduduk Argentina. kedaulatan Argentina terhadap

⁵⁵ The British Empire diambil dari <http://www.britishempire.co.uk/forces/armycampaigns/southamerica/Falkland/Malvinass/Falkland/Malvinasswar.htm> diakses pada tanggal 10 oktober 2013

⁵⁶ *op. cit*

kepulauan Malvinas selalu menjadi isu yang diangkat disetiap pemilihan presiden Argentina. Presiden Argentina dituntut untuk bisa mengembalikan kepulauan Malvinas ke kedaulatan wilayah Argentina. Usaha yang telah dilakukan Argentina untuk mengembalikan Malvinas sebagai wilayah Argentina adalah dengan mengupayakan perundingan sampai melalui tindakan invasi militer.⁵⁷

Argentina menganggap bahwa penduduk kepulauan Falkland/Malvinas bukanlah penduduk asli kepulauan tersebut melainkan penduduk Inggris yang dipindahkan oleh pemerintah Inggris sekitar tahun 1883 setelah Inggris berhasil merebut kepulauan Malvinas dari Argentina.⁵⁸

Pada tahun 1982 dibawah pemerintahan Junta militer, Argentina menginvasi kepulauan Malvinas, tujuan dari invasi ini adalah untuk merebut kembali Malvinas dari Inggris. Invasi militer di Malvinas gagal setelah Inggris berhasil mengalahkan Argentina setelah berperang sekitar 2 bulan.⁵⁹ selain untuk merebut kembali Malvinas dari tangan Inggris, invasi Argentina di Malvinas juga bertujuan untuk menyatukan rakyat Argentina yang pada saat itu tengah mengalami krisis politik.⁶⁰ Argentina di tahun 1980-an mengalami krisis politik yang memicu konflik politik di Argentina. Junta militer pada tahun 1982 mampu menguasai Argentina,

⁵⁷ James Kirchick, Daily News America diambil dari <http://www.nydailynews.com/opinion/Falkland/Malvinass-matter-article-1.1292069> diakses pada tanggal 24 oktober 2013

⁵⁸ *op. cit*

⁵⁹ *op. cit*

⁶⁰ BBC NEWS diambil dari <http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/guides/457000/457033/html/> diakses pada tanggal 23 oktober 2013

dan menjadikan isu kedaulatan Malvinas untuk menyatukan rakyat Argentina.

Pemerintah Argentina menganggap Malvinas sebagai bagian dari kedaulatan negara tersebut. Argentina memasukkan Malvinas dalam kurikulum pendidikan sejarah yang diajarkan di sekolah. Argentina juga memasukkan Malvinas sebagai bagian dari distrik Argentina.⁶¹ Tujuan Argentina menamai dan memasukkan Malvinas kedalam kurikulum pendidikan mereka ialah untuk menanamkan kepada pelajar Argentina bahwa kepulauan Malvinas adalah bagian dari Argentina.

Setelah perang Falkland/Malvinas berakhir hubungan diplomatik antara Argentina dan Inggris dapat dikelompokkan menjadi tiga tahap. tahap pertama terjadi pada tahun 1982-1989, tahap kedua terjadi pada tahun 1989-2003, dan tahap ketiga hubungan diplomatik Argentina – Inggris terjadi sekitar tahun 2003 – sekarang. Pada tahap pertama, hubungan diplomatik antara Argentina dan Inggris berada pada yang buruk dalam sejarah hubungan bilateral antara kedua negara, yakni terjadinya pemutusan hubungan diplomatik oleh kedua negara. Pemutusan hubungan diplomatik antara kedua negara ditandai dengan terjadinya penarikan Duta besar oleh kedua negara, yang berlangsung selama delapan (8) tahun, pemutusan hubungan diplomatik ini berpengaruh terhadap pola politik luar negeri Argentina, terutama menyangkut mengenai status kedaulatan kepulauan Malvinas.

⁶¹ Argentina Gob. Ar. Guia Del Estado diambil dari <http://www.argentina.gob.ar/pais/57-malvinas-geografia-y-clima.php> diakses pada tanggal 23 oktober 2013

Tahap kedua hubungan diplomatik Argentina-Inggris berlangsung sekitar tahun 1989 – 2003, pada masa ini, Argentina dibawah pemerintahan Carlos Menem, mulai memperbaiki hubungan diplomatik dengan Inggris. Pada tanggal 19 Oktober 1989, kedua negara mengadakan perundingan di Madrid, Spanyol untuk membahas hubungan diplomatik antara kedua negara yang sempat terputus. Dalam pertemuan tersebut, Argentina dan Inggris sepakat untuk mengesampingkan isu kedaulatan kepulauan Falkland/Malvinas ketika kedua negara menjalin hubungan bilateralnya.

Dalam perjanjian *sovereignty umbrella* atau payung kedaulatan di Madrid kedua negara sepakat untuk:

- a. Membangun hubungan bilateral untuk meningkatkan kepercayaan antara kedua pihak untuk menghindari insiden militer
- b. Peningkatan hubungan komersial dan keuangan.
- c. Membangun komunikasi dan jalur transportasi, baik melalui udara dan laut.
- d. kesepakatan untuk melestarikan perikanan di wilayah tersebut (perairan Falkland/Malvinas) dan membangun dasar untuk kerjasama masa depan dalam industri perikanan
- e. Argentina sepakat untuk membangun hubungan dengan penduduk di kepulauan Falkland dalam hal budaya, hubungan ilmiah (pendidikan) , dan Olahraga.

f. Hubungan bilateral lainnya.⁶²

Perjanjian antara kedua negara ini lebih dikenal dengan sebutan *sovereignty umbrella*. Tujuan dari pengumuman kesepakatan *Sovereignty umbrella* adalah untuk memfasilitasi komunikasi antara Argentina dan Inggris tanpa membawa isu kedaulatan kepulauan Falkland/Malvinas. Dalam perjanjian *sovereignty umbrella*, Argentina sepakat tidak membahas dan menuntut Inggris untuk melakukan negosiasi tentang status kedaulatan kepulauan Malvinas.

Pada pertemuan kedua di Madrid, Februari 1990, Argentina dan Inggris sepakat untuk membangun kembali hubungan diplomatik secara penuh sesuai dengan laporan yang diterima dari kerja kelompok yang dibentuk tahun sebelumnya. dalam pertemuan kedua tersebut Inggris sepakat untuk mencabut status zona proteksi kepulauan Falkland/Malvinas, kedua negara juga mencapai kesepakatan membentuk South Atlantic Fisheries Commission (SAFC).⁶³ SAFC merupakan organisasi yang dibentuk oleh Argentina dan Inggris yang merupakan tindak lanjut dari perjanjian *sovereignty umbrella* di Madrid bertujuan untuk mengelola dan melestarikan stok ikan di kawasan Atlantik Selatan.

Hubungan diplomatik Argentina – Inggris semakin membaik ketika pada tanggal 26 Februari 1990 kedua negara membuka kembali kantor kedutaan di kedua negara, Argentina mengangkat Mario Campora sebagai

⁶² Roberto Laver, *The Falkland/ Malvinas: A New Framework for Dealing with the Anglo-Argentine Sovereignty Dispute*, The Fletcher Forum Of World Affairs. hal 152.

⁶³ *Ibid.*

duta besar di Inggris, dan Inggris menunjuk Sir Hamprey Maud sebagai duta besar Inggris untuk Argentina. Hubungan diplomatik Argentina – Inggris semakin membaik ketika pada tanggal 27 September 1995, kedua negara sepakat untuk menandatangani perjanjian hidrokarbon, yang berisi kesepakatan bahwa pemerintah Argentina dan Inggris sepakat untuk membentuk komisi bersama untuk memulai eksplorasi dan eksploitasi hidrokarbon seperti minyak dan gas di wilayah Barat Daya Atlantik sebagai wilayah kerjasama khusus kedua negara.⁶⁴ Argentina membuka kembali izin layanan penerbangan dari kawasan Amerika Selatan menuju kepulauan Falkland/Malvinas pada tanggal 14 Juli 1999, Pemerintah Argentina juga setuju dengan persyaratan dari pemerintah Inggris agar penduduk Argentina bersedia menunjukkan passpor jika bepergian menuju wilayah kepulauan Falkland/Malvinas.

Tahap ketiga dari hubungan diplomatik Argentina – Inggris terjadi dari tahun 2003, hubungan diplomatik kedua negara kembali renggang. Perjanjian *sovereignty umbrella* yang dibangun pada masa pemerintahan Carlos Menem dan telah berhasil memulihkan hubungan bilateral Argentina – Inggris tidak bertahan lama, dibawah pemerintahan Néstor Kirchner, Argentina kembali menginginkan agar Inggris bersedia mendiskusikan kembali kedaulatan atas kepulauan Falkland/Malvinas,

⁶⁴ Falkland/Malvinas Islands Government diambil dari <http://www.Falkland/Malvinass.gov.fk/self-governance/> diakses pada tanggal 25 oktober 2013

Néstor Kirchner juga menolak mempertahankan perjanjian *sovereignty umbrella*.⁶⁵

Hubungan diplomatik Argentina – Inggris semakin merenggang ketika pada tahun 2003 Argentina kembali mencabut ijin penerbangan menuju kepulauan Falkland/Malvinas, baik penerbangan langsung dari Argentina maupun penerbangan menuju Falkland/Malvinas yang melewati wilayah udara Argentina. Argentina hanya akan membuka kembali jalur penerbangan jika Inggris bersedia bernegosiasi dengan Argentina tentang status kepulauan Falkland/Malvinas. Argentina di bawah pemerintahan Néstor Kirchner, mengubah konsentrasi politik luar negerinya yang sebelumnya berusaha menyeleraskan kebijakannya sesuai dengan kebijakan Amerika dan Inggris diubah menjadi politik luar negeri Argentina berusaha untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan negara-negara di wilayah Amerika latin. Usaha Néstor Kirchner memperbaiki hubungan dengan sesama negara Amerika Latin dapat dilihat ketika Argentina memilih *abstain* dalam resolusi komisi HAM PBB yang mengkritik Kuba.⁶⁶ Presiden Argentina juga terus membawa isu kedaulatan kepulauan Falkland/Malvinas kedalam forum kerjasama regional seperti Mercosur, Organization of State America (OAS) hingga forum internasional PBB.⁶⁷

⁶⁵ Vaughne Miller, *Argentina and the Falkland/Malvinas Islands*, Library House Of Commons hal 2.

⁶⁶ Council of Hemispheric Affairs diambil dari <http://www.coha.org/cuba-the-un-human-rights-commission-and-the-oas-race/> diakses pada tanggal 29 oktober 2013

⁶⁷ *Ibid.*

Cristina Fernandez, yang terpilih menjadi presiden menggantikan suaminya Néstor Kirchner pada tahun 2007, tidak merubah kebijakan politiknya terhadap status kepulauan Falkland/Malvinas, Cristina Fernandez tetap berusaha untuk mendapatkan kedaulatan kepulauan Falkland/Malvinas dan terus membawa isu kedaulatan di setiap forum internasional, pada bulan Maret 2013 Cristina Fernandez juga meminta dukungan dari pemimpin agama katolik Paus Fransiskus agar menyerukan dialog terbuka Argentina-Inggris terkait status kepemilikan kepulauan Falkland/Malvinas.

Selain melakukan pendekatan terhadap negara-negara regional Amerika Latin dan dalam forum Internasional, upaya Argentina dalam mendapatkan kedaulatan atas kepulauan Falkland/Malvinas adalah dengan melakukan upaya *co-option*.⁶⁸ ada dua pilihan yang dilakukan oleh Argentina, pertama Argentina berupaya mendapatkan resolusi dari komite dekolonisasi PBB yang mendukung Argentina agar Inggris bersedia melakukan negosiasi terkait masalah kedaulatan kepulauan Falkland/Malvinas. Kedua, Argentina tetap menggunakan forum internasional untuk mendapatkan dukungan dari dunia internasional terutama dari forum kerjasama regional, dengan mendapatkan dukungan dari negara-negara Amerika latin Argentina dapat melarang kapal berbendera kepulauan Falkland/Malvinas untuk berlabuh di wilayah Argentina, Brasil, dan Uruguay.

⁶⁸ Klaus Dodds, *Stormy waters: Britain, the Falkland/Malvinas Islands and UK–Argentine relations*, The Chatam House, The Independent Thinking of International Affairs, hal 685

Kebijakan politik luar negeri Argentina di bawah pemerintahan Nestor Kirchner dan Cristina Fernandez dalam sengketa Kepulauan Falkland/Malvinas sangat bertolak belakang dengan politik luar negeri yang dilaksanakan oleh presiden Argentina periode sebelumnya. Perbedaan politik luar negeri Argentina disebabkan oleh krisis ekonomi yang dialami Argentina pada tahun 2002, sehingga Nestor Kirchner yang terpilih sebagai presiden pada 2003, lebih memfokuskan kebijakannya pada program kebangkitan nasional dan ekonomi.⁶⁹ Salah satu dari program kebangkitan nasional Nestor Kirchner adalah membangun nasionalisme penduduk Argentina dengan memperkuat klaim Argentina terhadap Kepulauan Falkland/Malvinas . Argentina juga melarang perusahaan-perusahaan tambang untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Kepulauan Falkland/Malvinas . untuk mempercepat perbaikan ekonomi Argentina, Kirchner membatalkan secara sepihak perjanjian untuk berbagi hasil dari minyak yang ditemukan di perairan Kepulauan Falkland/Malvinas dengan Inggris, pada tahun 2007. Malvinas memiliki cadangan minyak yang besar dan potensi peternakan dan perikanan yang besar mempunyai arti penting bagi percepatan perbaikan ekonomi Argentina. Timmerman Menteri luar negeri Argentina mengancam akan menggugat perusahaan minyak yang melakukan eksplorasi di perairan Falkland/Malvinas , upaya Argentina ini merupakan

⁶⁹ McCann, David. "Column: The British government is facing separation anxiety," diambil dari <http://www.thejournal.ie/readme/column-the-british-government-is-facing-separation-anxiety-511315-Jul2012/>, diakses pada tanggal 29 oktober 2013

penegasan terhadap klaim Argentina terhadap kepulauan Falkland/Malvinas.

Cristina Fernandez menuding bahwa Inggris berniat memperburuk hubungan diplomatik Argentina-Inggris dengan melakukan serangkaian aktifitas sepihak di kepulauan Falkland/Malvinas, meliputi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam non-terbarukan, serta mengadakan latihan militer di wilayah perairan Argentina. Kegiatan latihan Militer Inggris di perairan Argentina mengancam kedaulatan Argentina.

Argentina memiliki kepentingan untuk mendapatkan status kedaulatan atas kepulauan Falkland/Malvinas, Argentina menggunakan isu kedaulatan Falkland/Malvinas untuk menyatukan warga Argentina dan meredam konflik politik dalam negeri Argentina. Bagi Amerika, pulau yang memiliki cadangan minyak yang cukup besar ini, mampu memperbaiki dan mempercepat pembangunan ekonomi Argentina secara khusus dan negara di Amerika Latin secara umum. Cadangan minyak yang besar dan potensi industri perikanan yang cukup besar di samudera Atlantik ini menjadi tujuan bersama dari negara-negara di wilayah Amerika Selatan. Keberadaan Inggris di kepulauan Falkland/Malvinas dianggap mengganggu negara-negara Argentina, Brasil, Uruguay dan Venezuela untuk mengadakan eksplorasi sumber daya alam di wilayah yang secara geografis merupakan bagian dari benua Amerika bagian Selatan.

BAB IV

REFERENDUM INGGRIS DI KEPULAUAN FALKLAND/MALVINAS DAN DAMPAKNYA TERHADAP ARGENTINA

A. Kepentingan Inggris dalam Referendum di Kepulauan Falkland/Malvinas

Referendum Kepulauan Falkland/Malvinas pada bulan Maret 2013 menghasilkan keputusan bahwa penduduk Falkland/Malvinas masih ingin berada dalam wilayah kedaulatan Inggris. Referendum ini diadakan oleh pemerintah Inggris kepada penduduk Falkland/Malvinas untuk memutuskan apakah rakyat Falkland/Malvinas ingin berada di bawah pemerintahan Inggris atau menginginkan otoritas wilayah sendiri.

Pemerintah Kepulauan Falkland/Malvinas pada 12 Juni 2012 mengumumkan akan mengadakan referendum kepulauan Falkland/Malvinas untuk mengetahui pandangan penduduk Falkland/Malvinas mengenai status politik kepulauan Falkland/Malvinas. Pemerintah Falkland/Malvinas mengakui Inggris sebagai negara induk dari kepulauan Falkland/Malvinas, namun Argentina juga mengklaim kedaulatan atas Falkland/Malvinas dan secara aktif menyatakan kedaulatan Argentina atas Falkland/Malvinas melalui forum-forum Internasional, serta meminta Inggris untuk mengadakan perundingan mengenai status Falkland/Malvinas, maka pemerintah Falkland/Malvinas mengadakan

referendum untuk memutuskan penduduk Falkland/Malvinas masih bersedia menjadi wilayah seberang lautan Inggris atau tidak.⁷⁰

Pemerintah Inggris mendukung pengumuman referendum tersebut dan mengizinkan penduduk Falkland/Malvinas untuk menentukan masa depannya sendiri. Menurut Perdana Menteri Inggris, David Cameron, Inggris mengadakan referendum di kepulauan Falkland/Malvinas sebagai bentuk perhatian Inggris terhadap piagam PBB pasal 1 ayat 2 mengenai tujuan pendirian PBB yang tercantum "*To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace.*"⁷¹ Piagam PBB tersebut menjelaskan bahwa setiap negara anggota PBB wajib memberikan kesempatan kepada warga di wilayahnya untuk memilih kedaulatan untuk wilayahnya.

Menteri Hubungan Luar Negeri Inggris, William Hague mengatakan tujuan Inggris mengadakan referendum di Falkland/Malvinas adalah; "*We have always been clear that we believe in the rights of the Falkland/Malvinass people to determine their own futures and to decide on the path they wish to take. It is only right that, in the twenty-first century, these rights are respected*"⁷². Inggris percaya hak penduduk

⁷⁰ Falkland/Malvinas Island Government diambil dari <http://www.Falkland/Malvinass.gov.fk/home/referendum-2013/> diakses pada tanggal 11 November 2013

⁷¹ United Nations diambil dari <http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml> diakses pada tanggal 11 November 2013

⁷² William Hague, GOV.UK diambil dari <https://www.gov.uk/government/world-location-news/Falkland/Malvinas-islands-vote-to-remain-british-overseas-territory> diakses pada tanggal 06 November 2013

Falkland/Malvinas untuk menentukan nasibnya sendiri apakah ingin tetap menjadi bagian dari wilayah seberang lautan Inggris atau ingin melepaskan diri dari wilayah Inggris.

Pernyataan Perdana Menteri dan Menteri Hubungan Luar Negeri Inggris ini mengaskan bahwa Inggris berdaulat penuh atas kepulauan Falkland/Malvinas. Inggris tidak akan menerima resolusi penyelesaian konflik yang ditawarkan oleh PBB dan Argentina yaitu dengan melakukan perundingan, karena akan menciderai kedaulatan Inggris atas kepulauan Falkland/Malvinas. Inggris hanya bersedia melepas kepulauan Falkland/Malvinas jika penduduk di kepulauan itu, ingin melepaskan diri dari kepulauan Falkland/Malvinas.

Perdana Menteri Inggris David Cameron menyatakan bahwa hak yang diterima oleh penduduk Falkland/Malvinas merupakan hak yang sama yang diterima oleh seluruh warga Inggris di wilayah Inggris. Selain referendum kepulauan Falkland/Malvinas, pemerintah Inggris juga telah menyetujui permintaan referendum politik yang diajukan oleh warga Skotlandia.⁷³ Inggris memberikan kesempatan kepada seluruh warganya di wilayah Inggris lainnya jika ingin mengadakan referendum mengenai status kedaulatan politik Inggris.

a. Proses Referendum di Kepulauan Falkland/Malvinas

Sejak mengumumkan pelaksanaan referendum pada 12 Juni 2012 oleh pemerintah kepulauan Falkland/Malvinas dan disetujui oleh

⁷³ GOV.UK diambil dari <https://www.gov.uk/government/news/number-10-press-briefing-3-april-2012-morning> diakses pada tanggal 05 November 2013

pemerintah Inggris. Pemerintah Falkland/Malvinas menunjuk Konrad Olszewski sesuai dengan rekomendasi dari *Electoral Reform International Services* (ERIS) untuk memberikan nasihat tentang Referendum, termasuk pada perumusan pertanyaan dan proses Referendum. Berdasarkan saran yang diterima, Pemerintah Kepulauan Falkland/Malvinas memutuskan untuk mengadopsi serangkaian "peraturan" untuk menunjukkan komitmen pemerintah Falkland/Malvinas dalam proses referendum yang aman, terbuka dan transparan, termasuk ketentuan untuk mempublikasikan semua proses referendum melalui laman resmi referendum: <http://www.Falkland/Malvinass.gov.fk/home/referendum-2013/>.⁷⁴

Pemerintah kepulauan Falkland/Malvinas membentuk panitia referendum yang dipimpin oleh Keith Padget bertugas untuk mensosialisasikan dan mendata warga Falkland/Malvinas yang berhak mengikuti referendum kepulauan Falkland/Malvinas. Panitia referendum kepulauan Falkland/Malvinas juga membuat dan mensosialisasikan sepuluh (10) peraturan dan syarat-syarat penduduk mengikuti referendum. sosialisasi mulai efektif berjalan sejak bulan Januari 2013.⁷⁵ 10 Peraturan referendum tersebut disosialisasikan melalui siaran berita, media cetak, siaran radio dan diposting di *website* resmi pemerintah kepulauan Falkland/Malvinas.

Aturan referendum tersebut terdiri atas:

⁷⁴ RIOM-MIOR, Referendum Final Report, hal 2 diambil dari www.riom-mior.com/index-files/Referendum%20Final%20Report_Final.pdf diakses pada tanggal 12 November 2013

⁷⁵ *Ibid*

1. Peraturan untuk Pengangkatan Pejabat Referendum dan Staf
2. Peraturan untuk Periode akhir Referendum
3. Peraturan untuk Pengamat Referendum
4. Peraturan untuk Aplikasi Pendaftaran, dan Aplikasi untuk proxy, Pos dan Pos Proxy Vote
5. Peraturan polling
6. Peraturan untuk Daftar Pemilihan
7. Makalah Suara, Keamanan Bahan Referendum
8. Peraturan untuk Penghitungan Suara
9. Peraturan untuk Media dan Polling
10. Peraturan untuk voting di penjara Stanley

10 aturan referendum yang dibuat oleh komite referendum kepulauan Falkland/Malvinas dibuat sesuai dengan standar referendum internasional yaitu memastikan jaminan kerahasiaan suara dan meningkatkan keamanan proses pemungutan suara yang sejalan dengan standar internasional yang ada untuk pelaksanaan referendum. Peraturan referendum yang dibuat oleh komite referendum kepulauan Falkland/Malvinas dibuat untuk menjamin kerahasiaan suara dengan menghapus nomor seri dari surat suara, hal ini memastikan bahwa suara tidak dapat ditelusuri kembali ke pemilih, dan untuk melindungi referendum dari upaya pemilih yang memilih lebih dari satu surat suara, komite referendum membagi TPS sesuai dengan wilayah domisili pemilih dan menerapkan prosedur pengecekan untuk

memverifikasi bahwa pemilih sebelumnya tidak memilih di lokasi yang berbeda

Komite referendum kepulauan Falkland/Malvinas sejak tanggal 1 November 2012 menyiarkan dan menyebarkan selebaran tentang format pertanyaan referendum kepada warga Falkland/Malvinas dengan format:

The current political status of the Falkland/Malvinas Islands is that they are an Overseas Territory of the United Kingdom. The Islands are internally self-governing, with the United Kingdom being responsible for matters including defense and foreign affairs. Under the Falkland/Malvinas Islands Constitution the people of the Falkland/Malvinas Islands have the right to self-determination, which they can exercise at any time. Given that Argentina is calling for negotiations over the sovereignty of the Falkland/Malvinas Islands, this Referendum is being undertaken to consult the people regarding their views on the political status of the Falkland/Malvinas Islands. Should the majority of votes cast be against the current status, the Falkland/Malvinas Islands Government will undertake necessary consultation and preparatory work in order to conduct a further Referendum on alternative options.
Do you wish the Falkland/Malvinas Islands to retain their current political status as an Overseas Territory of the United Kingdom?
*YES /NO.*⁷⁶

Komite referendum kepulauan Falkland/Malvinas juga bekerja sama dengan organisasi pengamat internasional *The Referendum International Observation Mission (RIOM)*. RIOM bertugas untuk mengamati proses referendum di Falkland/Malvinas dan menjamin referendum berlangsung secara bebas dan adil dan sesuai dengan kehendak pemilih tanpa adanya tekanan dari pemerintah Inggris sebagai negara induk kepulauan Falkland/Malvinas.⁷⁷ Tim pengawas RIOM dipimpin oleh Brad Smith,

⁷⁶ *Ibid* hal 6

⁷⁷ Mission Internasional Referendum Observer (RIOM-MIOR) diambil dari <http://www.riom-mior.com/> diakses pada tanggal 12 November 2013

dalam referendum kepulauan Falkland/Malvinas tim pengawas terdiri dari ketua referendum dan wakil ketua referendum ditambah dengan delapan (8) anggota pengamat referendum internasional dari negara Brazil, Chile, Mexico, New Zealand, Uruguay dan Amerika Serikat. Anggota pengamat referendum merupakan perwakilan dari pejabat terpilih, pemimpin organisasi kemasyarakatan, Pemimpin partai politik, dan ahli teknis referendum.

Dalam proses referendum, komite referendum kepulauan Falkland/Malvinas bekerja sama dengan Jaksa Agung, Panitera dan Anggota Dewan. Komite referendum bekerja sama dengan Anggota Dewan Legislatif untuk membuat dan mengembangkan aturan mengenai proses referendum tersebut. Panitera di tunjuk oleh komite untuk mengelola semua logistik Referendum, mengelola daftar pemilih, melakukan perekrutan dan pelatihan petugas TPS, dan mengawasi proses pemungutan suara pada 10 dan 11 Maret. Jaksa Agung bertugas pada saat proses penghitungan suara sebagai konsultan bagi komite referendum untuk memutuskan keabsahan dari suara pemilih.⁷⁸

Komite Referendum kepulauan Falkland/Malvinas melalui media televisi, radio, dan surat kabar selain mensosialisasikan format pertanyaan referendum juga menyebarkan secara berkelanjutan informasi penting mengenai referendum, seperti tanggal dan waktu referendum, tata-cara pendaftaran referendum, pilihan yang dapat digunakan untuk mengikuti

⁷⁸ *Ibid. hal 7*

pemungutan suara seperti melalui media pos, media *proxy-server* (online), TPS tetap, atau melalui TPS berjalan, serta tenggat waktu untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih melalui media pos dan *proxy-server*.⁷⁹ Proses pendaftaran pemilih melalui media pos atau *proxy-server* diatur dalam peraturan referendum nomor empat (4)

Peserta referendum seperti yang diatur dalam peraturan referendum adalah semua warga kepulauan Falkland/Malvinas yang berusia delapan belas (18) tahun atau lebih dan berada di kepulauan Falkland/Malvinas lebih dari dua belas (12) bulan sebelum proses referendum. Personel militer Inggris yang ditempatkan di pangkalan militer Mount Pleasant, dan warga asing yang telah menetap di kepulauan Falkland/Malvinas lebih dari dua belas (12) bulan, namun belum melalui proses naturalisasi, tidak berhak untuk mengikuti proses referendum.

Media televisi, surat kabar, dan radio selain mensosialisasikan dan menyebarkan aturan dan format pertanyaan referendum, sejak Januari 2013 juga ikut mengkampanyekan pentingnya referendum bagi masa depan penduduk di kepulauan tersebut. Media massa di kepulauan Falkland/Malvinas secara berkala memberitakan wawancara dengan anggota komite referendum tentang persiapan referendum. Komite referendum juga mengkampanyekan tata cara mengikuti referendum sesuai dengan standar referendum internasional.

⁷⁹ *Ibid* hal 7

Proses referendum di Falkland/Malvinas berlangsung selama dua hari pada 10-11 Maret 2013. Inggris mengundang Kanada, Chile, Meksiko, Selandia Baru, Paraguay, Amerika Serikat, dan Uruguay sebagai pengawas internasional dalam proses referendum. Proses transportasi logistik referendum telah dilakukan sejak tanggal 9 Maret 2013, anggota komite referendum bersama pengawas internasional mengantarkan logistik referendum ke tempat pemungutan suara (TPS) di pulau Falkland/Malvinas barat. Kertas suara dan daftar pemilih disimpan dalam amplop bersegel dan ditempatkan dalam kotak suara bersegel untuk memastikan bahwa kertas suara tetap tertutup selama proses transportasi. Logistik referendum tersebut disimpan dalam ruangan terkunci yang hanya dipegang oleh petugas referendum.

Pada tanggal 10 Maret 2013 petugas referendum bersama dengan pengawas internasional mendistribusikan logistik referendum untuk TPS di pulau Falkland/Malvinas Timur dan TPS *Mobile* (berjalan). distribusi logistik referendum di hari kedua sesuai dengan distribusi logistik di pulau Falkland/Malvinas Barat, khusus TPS berjalan transportasi logistik referendum dikirim ke pulau-pulau terpencil yang berada di sekitar kepulauan Falkland/Malvinas. komite referendum juga menyediakan TPS khusus yang berada di rumah sakit, panti jompo dan penjara.

Pemungutan suara dilakukan selama dua hari, 10 dan 11 Maret jejak pendapat dibuka dari pukul 10.00 hingga 18.00. Terdapat empat lokasi TPS tetap, dua di pulau Falkland/Malvinas Timur (Stanley dan Goose

Green) dan dua di pulau Falkland/Malvinas Barat (Port Howard dan Fos Bay). Komite referendum menyediakan 4 TPS berjalan yang terdiri dari 3 TPS berjalan beroperasi di pulau Falkland/Malvinas Timur dan 1 TPS berjalan beroperasi di Falkland/Malvinas Barat, komite referendum juga menyediakan 1 TPS udara untuk melayani warga yang menetap di pulau-pulau terpencil Falkland/Malvinas.⁸⁰ Pada tanggal 11 Maret, Komite referendum mengadakan pemungutan suara di rumah sakit, panti jompo, dan penjara. proses jejak pendapat di tempat khusus ini dilaksanakan sesuai dengan aturan referendum nomor 5. Tempat pemungutan suara di kota Stanley merupakan TPS tersibuk dalam proses referendum karena lebih dari 90% pemilih menetap di kota Stanley hal ini menyebabkan antrean pemilih menumpuk di TPS ini, rata-rata pemilih yang terdaftar di TPS Stanley harus menunggu 30 menit hingga mendapatkan giliran memilih.

Komite referendum kepulauan Falkland/Malvinas mengizinkan penduduk kepulauan tersebut untuk memilih lokasi dan metode pemilihan. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya suara ganda maka sesuai dengan aturan referendum nomor 5, komite referendum membuat aturan untuk memastikan bahwa tidak ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali. Peraturan referendum nomor 5 berisi:

- Pemilih wajib diberitahukan akan tempat pemungutan suara dimana pemilih tersebut terdaftar sebelum 19 Februari 2013

⁸⁰ *Ibid* hal 11

- Pemilih yang berhalangan hadir atau tidak dapat mengikuti pemilihan di TPS tempat pemilih tersebut terdaftar dapat menghubungi panitera untuk ditempatkan di lokasi pilihan mereka.
- Selama proses referendum petugas referendum wajib memeriksa daftar relokasi pemilih untuk memastikan tidak ada pemilih ganda
- Pemilih yang memutuskan untuk memilih bukan di TPS tempatnya terdaftar dan memilih TPS lain, jika namanya terdaftar dalam daftar re-alokasi maka pemilih tersebut berhak memilih tanpa melalui proses *cross-check*
- Jika pemilih memutuskan untuk memilih bukan di TPS tempatnya terdaftar dan tidak masuk dalam daftar re-alokasi TPS maka petugas referendum wajib melakukan konfirmasi ke petugas TPS tempat pemilih tersebut terdaftar sebelum diijinkan untuk memilih
- Pemilih yang telah memilih namanya akan di silangkan dengan pena hitam oleh petugas pemilihan
- Pemilih yang tidak masuk dalam daftar re-alokasi namun telah memilih bukan di TPS tempatnya terdaftar akan dicoret dengan tinta merah, jika telah mendapat konfirmasi dari petugas referendum.⁸¹

⁸¹ Arrangement and Rules for the Referendum on the Political Status of the Falkland/Malvinas Islands No.5 Polling Arrangements diambil dari www.Falkland/Malvinass.gov.fk/assets/Arrangements-Rules-for-the-Referendum-no.5.pdf diakses pada tanggal 19 November 2013

Peserta terdaftar referendum yang diadakan di Falkland/Malvinas berjumlah 1.650 namun peserta yang mengikuti proses referendum berjumlah 1.517 sekitar 8% atau 135 orang dinyatakan tidak mau berpartisipasi dalam proses referendum tersebut. sebagian besar dari 135 orang yang tidak mengikuti proses referendum merupakan warga Falkland/Malvinas yang berada diluar negeri dan tidak memanfaatkan pemilihan melalui jalur pos atau jalu proxy

Tabel 4.1: Hasil Referendum Kepulauan Falkland/Malvinas

Falkland/Malvinas Islands sovereignty referendum, 2013		
Choice	Votes	Percentage
✓ Yes	1,513	99.80%
No	3	0.20%
Valid votes	1,516	99.93%
Invalid or blank votes	1	0.07%
Total votes	1,517	100.00%
Voter turnout		92.00%
Electorate		1,650

Sumber : Falkland/Malvinas Islands Government

Dari sekitar 1517 warga yang mengikuti referendum 1513 warga setuju untuk tetap berada dalam kedaulatan Inggris, 3 warga menolak bergabung dengan Inggris, 1 suara dinyatakan tidak sah dan 3 warga abstain. dengan demikian referendum kepulauan Falkland/Malvinas menetapkan bahwa warga Falkland/Malvinas masih ingin menjadi wilayah seberang lautan Inggris.

Tabel 4.2: Statistik Partisipasi Penduduk Dalam Referendum

Falkland/Malvinas Islands sovereignty referendum, 2013		
		Total
Total voter		1.650
Total Votes		1.517
Proxy Votes	Stanley	106
	Camp	14
Postal Votes	Stanley	14
	Camp	27
Poll Votes	Stanley	1220
	Camp	136

Sumber: MIOR/RIOM Final Report

Dalam tabel statistik tingkat partisipasi penduduk dalam mengikuti referendum kepulauan Falkland/Malvinas sekitar 1356 warga mengikuti referendum melalui TPU yang disediakan oleh panitia. Warga yang mengikuti referendum melalui jalur pos berjumlah 41 orang dan 120 orang mengikuti referendum melalui jalur *Proxy*.

Antusiasme penduduk kepulauan Falkland/Malvinas dalam mengikuti proses referendum membuktikan bahwa penduduk kepulauan yang berada di atlantik selatan ini sangat ingin untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik kedaulatan. Sekitar 92% penduduk kepulauan yang terdaftar menggunakan hak pilihnya. Masyarakat Falkland/Malvinas walaupun mendapat tekanan dari Argentina dan beberapa Anggota

MERCOSUR tetap mengadakan referendum demi menunjukkan keinginan yang kuat penduduk kepulauan untuk mendapat pengakuan dari seluruh dunia mengenai keinginan politik mayoritas penduduk kepulauan.

b. Sikap Inggris Pasca Pengumuman Hasil Referendum Kepulauan Falkland/Malvinas

Proses referendum Inggris di Falkland/Malvinas menghasilkan keputusan bahwa penduduk Falkland/Malvinas menginginkan untuk tetap menjadi bagian dari wilayah seberang lautan Inggris. Referendum di kepulauan Falkland/Malvinas menurut *Mission International Referendum Observer* telah sesuai dengan standar referendum internasional dan berlangsung netral tanpa tekanan dari pihak tertentu.

William Hague, Menteri Luar Negeri Inggris menyambut baik hasil referendum tersebut, dan menghimbau agar seluruh negara termasuk Argentina menerima hasil dari referendum tersebut.⁸² Pemerintah Inggris menghargai keinginan rakyat kepulauan Falkland/Malvinas untuk tetap menjadi bagian dari wilayah seberang lautan Inggris dan Inggris menganggap telah melaksanakan piagam PBB yaitu menghargai hak rakyat untuk menentukan masa depannya sendiri.

Keputusan rakyat Falkland/Malvinas memberikan legitimasi bagi pemerintah Inggris untuk tetap mempertahankan angkatan militernya di kepulauan Falkland/Malvinas. Pemerintah Inggris menjadikan keputusan

⁸² William Hague, GOV.UK diambil dari <https://www.gov.uk/government/news/Falkland/Malvinas-islands-vote-to-remain-british-overseas-territory> diakses pada tanggal 19 November 2013

referendum sebagai dasar untuk tetap mempertahankan kedaulatannya di kepulauan Falkland/Malvinas sebagai negara induk yang mempunyai kewajiban untuk mengatur urusan luar negeri Falkland/Malvinas.

David Cameron sebagai perdana Menteri Inggris menyatakan bahwa pemerintah Inggris, akan selalu melindungi hak-hak penduduk kepulauan Falkland, dan terus memperjuangkan agar referendum yang berlangsung tersebut dapat diterima oleh pihak Argentina.⁸³ David Cameron menyatakan bahwa Inggris tidak akan membiarkan Argentina merebut sumber daya alam yang dimiliki oleh penduduk Falkland/Malvinas dan menyebabkan kemunduran ekonomi bagi kepulauan tersebut.

Sebagai manusia yang memiliki hak asasi, penduduk kepulauan Falkland/Malvinas memiliki hak untuk menentukan pilihan mereka tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Referendum kemudian dipilih sebagai cara penduduk untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan seluruh penduduk kepulauan Falkland/Malvinas, Penduduk di kepulauan Falkland/Malvinas sadar akan adanya sengketa wilayah antara Inggris dan Argentina menyangkut status kedaulatan atas kepulauan tersebut. Penduduk kepulauan Falkland/Malvinas menggunakan hak untuk menentukan nasib sendiri, yang merupakan merupakan salah satu tujuan dari PBB, yaitu penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri dari masyarakat. Penduduk kepulauan

⁸³ Chris Irvine, The Telegraph, David Cameron promises to defend Falklands

<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/falklandislands/10529997/David-Cameron-promises-to-defend-Falklands.html> diakses pada tanggal 4 Januari 2014

Falkland/Malvinas berharap kedua negara mau menerima keputusan yang dihasilkan dalam referendum.

Inggris juga menyatakan bahwa tidak akan membuka kesempatan untuk melakukan perundingan dengan pemerintah Argentina dan PBB mengenai masalah kedaulatan kepulauan Falkland/Malvinas karena hasil referendum sudah sangat jelas memutuskan bahwa penduduk di kepulauan Falkland/Malvinas mengakui Inggris sebagai pemerintah yang berdaulat di Falkland/Malvinas dan penduduk tersebut masih ingin menjadi bagian wilayah seberang lautan Inggris.

Kepentingan Inggris dalam referendum di Falkland selain untuk menyelesaikan sengketa wilayah dengan Argentina tanpa melalui proses perundingan. Juga untuk mengetahui apakah penduduk Falkland/Malvinas masih bersedia menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Inggris. Keputusan referendum bahwa Falkland/Malvinas masih menjadi wilayah seberang lautan Inggris memberikan legitimasi bagi Inggris untuk dapat melakukan kegiatan politik, ekonomi dan militer di perairan Falkland/Malvinas.

B. Dampak Referendum di Kepulauan Falkland/Malvinas terhadap Argentina

Referendum mengenai status politik kepulauan Falkland/Malvinas yang memutuskan bahwa rakyat Falkland/Malvinas masih ingin berada sebagai wilayah seberang lautan Inggris mendapat reaksi keras dari Argentina. Pemerintah Argentina dengan tegas menolak keputusan

referendum tersebut, dan menganggap bahwa referendum kepulauan Falkland/Malvinas tidak sah.

Referendum yang dilaksanakan oleh pemerintah Inggris di kepulauan Falkland/Malvinas tidak sah, karena Argentina menganggap penduduk yang mendiami kepulauan Falkland/Malvinas bukan penduduk asli kepulauan tersebut, Argentina menganggap bahwa penduduk kepulauan Falkland/Malvinas adalah populasi yang di-*implan* oleh pemerintah Inggris.⁸⁴ Argentina pada bulan Januari mengirim surat terbuka kepada pemerintah Inggris agar Inggris menyerahkan kembali kepulauan Falkland/Malvinas kepada Argentina. Cristina Fernandez mengutip resolusi PBB tahun 1965 yang menyebutkan bahwa kedua negara disarankan untuk mengadakan negosiasi dalam penyelesaian sengketa kedaulatan.

Argentina sebagai negara yang mengklaim kedaulatan atas kepulauan Falkland/Malvinas, telah mengirim surat protes kepada badan dekolonisasi PBB atas referendum yang diadakan Inggris di kepulauan Falkland/Malvinas. Argentina memprotes tindakan referendum tersebut dan menganggap referendum tersebut sebagai salah satu bentuk pembodohan dan penghinaan terhadap Argentina karena menurut pemerintah Argentina masyarakat Falkland/Malvinas mengadakan referendum di atas wilayah kedaulatan Argentina. Penduduk kepulauan

⁸⁴ Dana Ford, *Argentina's president calls Falkland/Malvinas vote 'parody'*, CNN diambil dari <http://edition.cnn.com/2013/03/12/world/americas/Falkland/Malvinas-referendum/> diakses pada tanggal 21 November 2013

Falkland/Malvinas dikategorikan sebagai penduduk asal Inggris yang di-implan di wilayah kedaulatan Argentina.

Argentina menuding bahwa Inggris telah melanggar salah satu tujuan PBB yaitu semangat anti-kolonialisme. Cristina Fernandez menyatakan bahwa Inggris masih melakukan praktek kolonialisme dari upaya Inggris mempertahankan kekuasaannya atas Falkland/Malvinas. Falkland/Malvinas yang berada jauh dari wilayah pusat pemerintahan Inggris, menurut Fernandez merupakan wilayah yang seharusnya berada dibawah kedaulatan Argentina. Fernandez disetiap forum-forum internasional menyerukan kepada Inggris untuk melepaskan wilayah kepulauan Falkland/Malvinas kepada Inggris sebagai bentuk kepatuhan Inggris terhadap semangat anti kolonialisme.

Kepulauan Falkland/Malvinas sebagai salah satu wilayah di Atlantik selatan yang memiliki cadangan minyak yang besar, menjadikan Falkland/Malvinas sebagai wilayah yang mempunyai nilai strategis tinggi bagi Argentina. kepemilikan penuh atas kepulauan Falkland/Malvinas memberikan kesempatan bagi Argentina untuk mengeksplorasi sumber daya alam demi meningkatkan kegiatan perekonomian Argentina. Argentina beberapa tahun terakhir mengalami dampak dari krisis ekonomi global yang menyebabkan ekonomi Argentina mengalami inflasi hingga 20%.⁸⁵ Tingginya tingkat demonstrasi di Argentina selama tahun 2011

⁸⁵ The Economist <http://www.economist.com/node/21548229> diakses pada tanggal 25 November 2013

hingga 2012 menandakan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Argentina menurun.

Argentina sebagai salah satu negara dengan perekonomian yang paling berkembang di kawasan Amerika Selatan, sejak tahun 2011 mengalami masa krisis ekonomi global yang menyebabkan tingginya angka demonstrasi di Argentina menuntut mundurnya presiden Cristina Fernandez. Kepulauan Falkland/Malvinas disamping memiliki cadangan minyak yang cukup besar, juga mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan semangat nasionalisme warga Argentina, Presiden memanfaatkan nilai strategis ini untuk mengalihkan isu ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah.

Hector Timmerman, Menteri Luar Negeri Argentina, menyatakan bahwa sikap tegas Inggris mempertahankan kepulauan Falkland/Malvinas sebagai bagian dari wilayahnya, adalah salah satu upaya untuk melemahkan kemampuan ekonomi negaranya.

Argentina merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi paling pesat di Amerika Selatan, untuk menghindari dampak dari krisis global, salah satu kepentingan nasional Argentina saat ini ialah untuk memajukan kegiatan perekonomian dengan mendorong kegiatan produksi dan penjualan minyak mentah hasil dari kepulauan Falkland/Malvinas dan beberapa wilayah di Atlantik Selatan, jika Argentina bisa mendapatkan status kedaulatan atas Falkland/Malvinas.

Sikap tegas Argentina menolak diadakannya referendum kepulauan Falkland/Malvinas karena Argentina merasa referendum tidak sah, karena diadakan oleh sekelompok populasi implan di dalam wilayah kedaulatan Argentina. Penduduk kepulauan oleh pemerintah Argentina dikategorikan sebagai warga negara Inggris yang secara ilegal menetap di wilayah kedaulatan Argentina. Tindakan sepihak pemerintah kepulauan Falkland/Malvinas dalam mengadakan referendum politik di Falkland/Malvinas, oleh Menteri luar negeri Argentina merupakan tindakan yang melanggar kedaulatan negara.

Hasil referendum yang memutuskan bahwa rakyat Falkland/Malvinas masih ingin berada di bawah wilayah kedaulatan Inggris, sangat merugikan Argentina. Argentina belum bisa menyelesaikan sengketa wilayah ini melalui Mahkamah Internasional karena Argentina belum mengakui yuridiksi Mahkamah Internasional.⁸⁶ Jalur negosiasi merupakan jalur yang paling memungkinkan bagi Argentina jika ingin mendapatkan kepulauan Falkland/Malvinas. Biaya operasional militer Inggris yang tinggi dalam melindungi wilayah teritorial seberang lautan digunakan oleh Argentina sebagai salah satu isu yang akan dibahas oleh Argentina jika Inggris bersedia mengadakan negosiasi.

Argentina meminta bantuan dari beberapa organisasi internasional untuk mengadakan negosiasi dengan pemerintah Inggris. Dalam upaya mendapatkan status kedaulatan atas kepulauan Falkland/Malvinas,

⁸⁶ Khan, M. Imad, 2012, *Reemergence of the Falkland Islands Territorial Dispute*, American Bar Association. hal 3

Argentina meminta dukungan dari anggota MERCOSUR, OAS, UNASUR, CELAC dan beberapa negara di benua Afrika. Argentina lebih melakukan praktek *Soft-Diplomacy* dalam penyelesaian sengketa wilayah. Cristina Fernandez menyatakan bahwa Argentina berjanji untuk menyelesaikan konflik antara kedua negara melalui jalur damai sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan memperhatikan kepentingan penduduk kepulauan.⁸⁷

Dalam pertemuan kepala negara dan pemerintahan Afrika dan Amerika Selatan (ASA) di Malabo pada 20-22 Februari 2013, seluruh peserta sepakat untuk mengakui hak-hak sah Argentina dalam sengketa kedaulatan atas Kepulauan Malvinas, Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan dan daerah maritim di sekitarnya, dan mendesak Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara untuk melanjutkan perundingan dengan Argentina untuk mencapai, sesegera mungkin solusi adil, damai, adil dan definitif dalam penyelesaian sengketa sesuai dengan resolusi yang relevan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi regional dan internasional lainnya.⁸⁸

Argentina juga berusaha untuk mengubah pandangan negara-negara di Amerika Selatan dengan menyatakan bahwa isu kedaulatan Falkland/Malvinas bukan hanya masalah antara Argentina dan Inggris,

⁸⁷ Argentina Un Pais Con Buena Gente, diambil dari <http://www.mrecic.gov.ar/es/question-malvinas-islands-0> Diakses pada tanggal 25 November 2013

⁸⁸ Africa-South America Summit, Declaration de Malabo diambil dari www.mrecic.gov.ar/userfiles/documentos-malvinas/asa_2013_-_declaracion_de_malabo.pdf diakses pada 26 November 2013

melainkan isu kedaulatan Falkland/Malvinas juga merupakan isu seluruh negara Amerika Selatan. Argentina dalam pertemuan tingkat Menteri negara-negara Amerika Selatan di Uruguay 16 Januari 2013 berhasil mendeklarasikan resolusi yang menyatakan untuk menghentikan bentuk kolonialisme yang dilakukan oleh Inggris di Kepulauan Falkland/Malvinas karena melanggar tujuan PBB dan juga mengganggu kedaulatan dan integritas teritorial dari beberapa negara anggota ZPCAS. Resolusi ZPCAS juga mendukung upaya negara-negara anggota ZPCAS dalam penyelesaian sengketa dengan cara damai dalam mencari solusi negosiasi untuk sengketa wilayah yang melibatkan negara-negara anggota ZPCAS. Resolusi ZPCAS menyerukan dimulainya kembali perundingan antara Pemerintah Argentina dan Inggris Raya dan Irlandia Utara, sesuai dengan resolusi PBB nomor 2065 dan resolusi terkait lainnya oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyangkut sengketa Kepulauan Falkland/Malvinas. Resolusi Uruguay juga menegaskan kembali resolusi Majelis Umum 31/49, yang mengharuskan kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa kedaulatan atas Kepulauan Falkland/Malvinas untuk tidak melakukan eksplorasi dan eksploitasi dari wilayah yang sedang disengketakan. Argentina dan negara anggota ZPCAS menyatakan bahwa Inggris telah melanggar resolusi PBB nomor 31/49 atas kegiatan eksplorasi hidrokarbon tidak sah di wilayah sengketa dan memperkuat kehadiran militer Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara di daerah tersebut.

Upaya pendekatan Argentina kepada masyarakat internasional, menghasilkan resolusi PBB dalam pertemuan di Qatar. Argentina dan beberapa negara mendesak Inggris agar berhenti mengabaikan kewajibannya sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Resolusi PBB dalam pertemuan di Qatar menegaskan bahwa perlunya pemerintah Argentina dan Kerajaan Britannia Raya dan Irlandia Utara untuk melanjutkan perundingan sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan piagam PBB dan resolusi yang relevan dari Majelis Umum, dalam rangka untuk menemukan solusi damai untuk sengketa kedaulatan yang berkaitan dengan kedaulatan kepulauan Falkland/Malvinas.⁸⁹

Protes keras Argentina terus dilakukan melalui forum internasional terutama melalui badan dekolonisasi PBB terhadap pemerintah Inggris yang telah mengadakan referendum. Argentina melalui laman resmi pemerintah Argentina, mempublikasikan pandangan-pandangan ahli hubungan internasional yang menentang referendum Inggris di Falkland/Malvinas.

Argentina dalam usahanya mendapatkan status kedaulatan di kepulauan Falkland/Malvinas menerapkan tiga (3) kebijakan yaitu; dengan menjadikan isu sengketa wilayah sebagai masalah regional Amerika Selatan sekaligus berusaha menarik simpati dan dukungan masyarakat internasional di setiap forum-forum internasional yang diikuti oleh Argentina. Kedua Argentina juga menerapkan kebijakan untuk

⁸⁹ Argentina Un Pais Con Buena Gente, diambil dari <http://www.mrecic.gov.ar/node/34997> Diakses pada tanggal 25 November 2013

melemahkan perekonomian penduduk Falkland/Malvinas dengan cara melarang dan mempersulit akses menuju kepulauan Falkland/Malvinas dari wilayah Amerika Selatan dan juga melarang kapal berbendera Falkland/Malvinas berlayar di wilayah perairan Argentina dan negara-negara anggota MERCOSUR. Ketiga, Argentina berupaya untuk menarik dukungan dari penduduk dunia dengan bekerjasama dengan tokoh-tokoh dan Selebritis dunia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data-data dan fakta-fakta di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepentingan Inggris dalam mengadakan referendum dikepulauan Falkland/Malvinas adalah untuk menjaga kedaulatan wilayahnya dan mengamankan sumber daya alam yang terdapat di sekitar kepulauan Falkland/Malvinas. Inggris juga berpkepentingan untuk memberikan dan melindungi hak-hak rakyat atau penduduk yang berada dalam wilayah kedaulatannya. Inggris menganggap bahwa rakyat Falkland/Malvinas memiliki hak yang sama seperti yang dimiliki warga Inggris lainnya oleh sebab itu walaupun diprotes oleh beberapa negara wilayah Amerika Selatan dan Afrika, Inggris tetap melakukan proses referendum karena penduduk Falkland/Malvinas meminta Inggris untuk mengadakan referendum politik di wilayah tersebut.

2. Dampak Referendum Inggris di kepulauan Falkland/Malvinas terhadap Argentina adalah Argentina menolak mengakui referendum yang diadakan oleh pemerintah Inggris dan memilih untuk tetap mengadakan jalur perundingan dengan pemerintah Inggris untuk menyelesaikan sengketa wilayah antara kedua

negara. Argentina juga telah mengirimkan surat protes terhadap komite dekolonisasi PBB dan menyatakan bahwa pemerintah Inggris masih berusaha untuk melakukan kegiatan kolonialisme dengan menolak melepas kepulauan Falkland/Malvinas ke pemerintah Argentina. Argentina juga berusaha untuk meminta dukungan negara-negara anggota MERCOSUR untuk mendukung Argentina dalam mendapatkan kedaulatan atas kepulauan Falkland/Malvinas.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang penulis dapat berikan dengan melihat kondisi yang dipaparkan di atas adalah:

1. Argentina dan Inggris perlu menyelesaikan masalah sengketa wilayah melalui jalur perundingan untuk mencapai kesepakatan dengan konsep *win-win solution* Argentina dan Inggris hendaknya menempatkan pihak lain bukan sebagai musuh melainkan sebagai *partner* untuk berdiskusi dan melihat kepentingan pihak lain sebagai hal yang patut untuk dipertimbangkan.
2. Dalam penyelesaian Sengketa wilayah kedua negara hendaknya menggunakan peranan pihak ketiga sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa wilayah. komite dekolonisasi PBB dapat

menjadi pihak ketiga yang netral dalam perundingan sengketa wilayah.

3. Argentina dan Inggris juga hendaknya memperhatikan hak-hak penduduk yang telah menetap di kepulauan Falkland/Malvinas dalam penyelesaian sengketa. karena walaupun warga kepulauan dikategorikan sebagai warga yang di-*implan* oleh pemerintah Inggris, warga kepulauan tersebut telah menetap di Falkland/Malvinas lebih dari 100 tahun jadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Griffiths, Martin dan Terry O'Callaghan, 2002, *International Relations: The Key Concepts*, Routledge, London.
- Held, David, 2004, *Demokrasi & Tatanan Global, Dari Negara Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Holsti, K,J, 1983, *Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis*, P,T, Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Jackson, Robert dan Georg Sorensen, 2009, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Morgenthau, Hans J, 1990, *Politik Antarbangsa*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Pareira, Andre H, 1994, *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*, Bandung, PT, Citra Adytia Bakri.
- Pito, T Adrianus, Fasyah Efriza, dan Kemal, *Mengenal Teori-Teori Politik; Dari Sistem Politik sampai Korupsi*, Penerbit Nuansa, Bandung.
- Rudy, T, May, 2005, *Adminsitirasi & Organisasi Internasional*, Refika Aditama, Bandung.
- Schouten, Peer, 2012, *Theory Talks: Perbincangan Pakar Sedunia tentang Teori Hubungan Internasional Abad ke-21*, Lembaga Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Masyarakat (LP3M) & Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan (PPSK), Yogyakarta.
- Sefriani, 2011, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sitepu, P, Anthonius, 2011, *Studi Hubungan Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Strake, J,G, 1986, *Pengantar Hukum Internasional*, Justita Study Group Bandung, Bandung.
- Suryokusumo, Sumaryo, 1987, *Organisasi Internasional*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Dokumen

- Falkland Islands Government: 79/13 Census 2012 Full Result and Analysis, Head Of Policy, 2013.
- Instrumento que otorgó M, Bougainville para la entrega de las Malvinas servicios,abc.gov.ar/docentes/efemerides/2deabril/descargas/historia/bouganville.pdf.*
- RIOM/MIOR Final Report, 2013.
- United Nations General Assembly: A/66/696-S/2012/86 Question of the Falkland Islands February (Malvinas), 2012.

United Nations General Assembly: A/66/706 Question of the Falkland Islands
February (Malvinas), 2012.

Skripsi

- Rohman, Dede, 2003, *Dampak Kerjasama militer Amerika Serikat – Indonesia Terhadap Stabilitas Keamanan Asia Tenggara*, Makassar, Universitas Hasanuddin.
- Sibala, Evisanty, 2006, *Kebijakan Republik Rakyat Cina Dalam Upaya Mewujudkan Reunifikasi dengan Taiwan*, Makassar, Universitas Hasanuddin.

Jurnal

- Cawell Mary, 1983, *The Falkland Story 1952-1982*, Anthony Nelson Limited.
- Benwell, Matthew C dan Klaus Dodds, 2011, *Argentine territorial nationalism revisited: The Malvinas/Falklands dispute and geographies of everyday nationalism*, Elsevier.
- Dodds, Klaus, 2012, *Stormy waters: Britain, the Falkland Islands and UK–Argentine relations*, The Chatam House, The Independent Thinking of International Affairs.
- Khan, M. Imad, 2012, *Reemergence of the Falkland Islands Territorial Dispute*, American Bar Association.
- Laver, Roberto, Summer 2001, *The Falklands/Malvinas: A New Framework for Dealing with the Anglo-Argentine Sovereignty Dispute*, The Fletcher Forum Of World Affairs, Vol 25:2.
- Miller, Vaughne, 2012, *Argentina and the Falkland Islands*, Library House Of Commons, IADS.
- Palermo, Vicente, 2011, *In Search of Common Good*.
- Royle, Stephen A, 2012 *Escaping from the past? The Falkland Islands in the Twenty-First Century*, International Small Island Cultures Conference Cape Breton University.
- Zarza, Leonardo Arcadio, 2010, *Malvinas: The Argentine Perspective of The Falkland's Conflict*, School of Advanced Military Studies United States Army Command and General Staff College Fort Leavenworth, Kansas.

Website

Argentina Gob. Ar. Guia Del Estado <http://www.argentina.gob.ar/pais/57-malvinas-geografia-y-clima.php> diakses pada tanggal 23 oktober 2013.

BBC

Indonesia
http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2010/02/100223_falklandsoil.shtml diakses pada tanggal 11 oktober 2013.

- BBC NEWS
<http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/guides/457000/457033/html/>
 diakses pada tanggal 23 oktober 2013.
- Boys, James, *The Commentator: Explaining America's stance on the Falklands* http://www.thecommentator.com/article/2918/explaining-america_s_stance_on_the_falklands diakses pada tanggal 09 November 2013..
- British Government <https://www.gov.uk/government/policies/supporting-the-falkland-islanders-right-to-self-determination> di akses pada 16 juli 2013.
- Cameron, David. *GOV.UK: Prime Minister's Falklands Statement* <https://www.gov.uk/Government/policies/supporting-the-falklands-islanders-right-to-self-determination> diakses pada tanggal 08 oktober 2013.
- CIA World Fact Book <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fk.html> di akses pada 14 juli 2013.
- CIA World Fact Book <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fk.html> diakses pada tanggal 08 Oktober 2013.
- Council of Hemispheric Affairs <http://www.coha.org/cuba-the-un-human-rights-commission-and-the-oas-race/> diakses pada tanggal 29 oktober 2013.
- Falkland Island Government <http://www.falklands.gov.fk/self-governance/relationship-with-argentina/> di akses pada 16 juli 2013.
- Falklands Island Government <http://www.falklands.gov.fk/our-people/our-history/> diakses pada tanggal 10 oktober 2013.
- Globalsecurity.
<http://www.globalsecurity.org/military/world/war/malvinas.htm>
 diakses pada tanggal 15 juli 2013.
- GOV.UK <https://www.gov.uk/british-forces-overseas-falkland-islands-and-ascension-island#more-like-this> diakses pada tanggal 07 oktober 2013.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php> di akses pada tanggal 15 juli 2013.
- Khairisa, Ferida.
<http://international.okezone.com/read/2012/06/15/414/647758/presiden-argentina-kembali-klaim-kepemilikan-falkland> di akses pada tanggal 14 juli 2013.
- Kirchick, James. Daily News America
<http://www.nydailynews.com/opinion/falklands-matter-article-1.1292069> diakses pada tanggal 24 oktober 2013.
- McCann, David. "*Column: The British government is facing separation anxiety.*" (<http://www.thejournal.ie/readme/column-the-british-government-is-facing-separation-anxiety-511315-Jul2012/>) diakses pada tanggal 29 Oktober 2013.

- The British Empire
<http://www.britishempire.co.uk/forces/armycampaigns/southamerica/falklands/falklandswar.htm> diakses pada tanggal 10 oktober 2013.
- The British Empire <http://www.britishempire.co.uk/maproom/falkland.htm>
diakses pada tanggal 10 oktober 2013.
- The Economist <http://www.economist.com/node/21551493> diakses pada tanggal 11 Oktober 2013.
- The Guardian <http://guardian.co.tt/news/2013-03-20/ambassador-tt-argentina-rejects-falkland-referendum> diakses pada tanggal 09 Oktober 2013.

LAMPIRAN

PETA KEPULAUAN FAKLAND / MALVINAS



Sumber: UN Data The World of Information

TABEL PERIODEISASI SEJARAH KEPULAUAN FALKLAND

No	Tahun	Peristiwa
1	1592	Kepulauan Falkland/Malvinas ditemukan oleh John Davis pelaut asal Inggris
2	1690	Kepulauan Falkland/Malvinas berhasil dipetakan oleh Kapten John Strong
3	1740	Lord Anson mendesak Inggris untuk menjadikan Falkland/Malvinas sebagai pangkalan militer
4	1764	Louis Antoine de Bougainville, penjelajah perancis mendirikan koloni Perancis di Port Louis, Falkland Timur
5	1765	Komandan perang kerajaan Inggris, John Bryon mengambil alih wilayah Falkland Barat.
6	1766	<ul style="list-style-type: none"> - Kapten John Macbride mendirikan pemukiman Inggris di Port Egmont - Spanyol memprotes keberadaan koloni Perancis di Falkland, koloni Bougainville sepakat untuk meninggalkan Falkland setelah Spanyol membeli Falkland Timur dari Perancis - Spanyol mengangkat Jendral Buenos Aires sebagai Gubernur Falkland
7	1770	Inggris dipaksa meninggalkan Falkland Barat oleh Spanyol
8	1771	Perancis, Inggris, dan Spanyol mengadakan negosiasi dan menghasilkan kesepakatan bahwa Port Egmont dikembalikan kepada Inggris
9	1774	Inggris menarik diri dari Port Egmont, karena pemindahan pasukan Inggris ke Amerika, namun Inggris meninggalkan plakat di Falkland Barat sebagai tanda kedaulatan Inggris atas Falkland Barat
10	1811	Spanyol menarik diri dari Puerto de la Soledad. Pada saat ini, koloni Spanyol di Amerika Selatan melakukan pemberontakan melawan Spanyol.

11	1816	Koloni-koloni tertua Spanyol di Amerika Selatan mendeklarasikan kemerdekaannya dan membentuk provinsi River Plate
12	1820	Pemerintah Buenos Aires mengklaim kepulauan Falkland sebagai bagian dari wilayahnya namun tidak dicantumkan dalam undang-undang.
13	1823	Pihak swasta berupaya untuk membangun pemukiman di kepulauan Falkland/Malvinas namun gagal.
14	1825	Inggris dan Pemerintah Buenos Aires menandatangani Perjanjian Persahabatan, Perdagangan dan Navigasi.
15	1826	Louis Vernet, warga naturalisasi Buenos Aires, mendirikan pemukiman baru di Puerto de la Soledad.
16	1829	Buenos Aires menunjuk Vernet sebagai komandan Falkland/Malvinas. Pemerintah Inggris memprotes dan menegaskan kedaulatan atas kepulauan Falkland
17	1831	Vernet menangkap 3 kapal Amerika Serikat yang berupaya menangkap ikan di perairan Falkland, Namun Amerika membalas dengan menghancurkan Puerto de la Soledad dan memaksa penduduk meninggalkan Falkland/Malvinas
18	1832	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan diplomatik Amerika Serikat dan Argentina putus, setelah kedua negara berselisih tentang wilayah kedaulatan Argentina di luar batas garis pantai Argentina - Buenos Aires menunjuk Komandan Mestivier sebagai Komandan sementara untuk Kepulauan Falkland/Malvinas, yang tiba sekitar satu bulan sebelum Inggris kembali menegaskan klaimnya di Pelabuhan Egmont.
19	1833	Komandan Mestivier telah dibunuh oleh anak buahnya sendiri pada saat Kapten Onslow berlayar dari Port Egmont di kapal perang 'Clio' dan mengambil alih Port Louis, dan mengklaim Falkland/Malvinas sebagai milik Inggris.

20	1845	Kota Stanley secara resmi menjadi ibukota Kepulauan Falkland
21	1914	Inggris berhasil memenangkan peperangan dikepulauan Falkland
22	1965	PBB mengesahkan resolusi 2065, yang menegaskan bahwa setiap anggota PBB wajib untuk mengikuti aturan PBB untuk mengakhiri segala bentuk penjajahan. PBB memanggil pemerintah Argentina dan Inggris untuk menyelesaikan secara damai sengketa kedaulatan kepulauan Falkland/Malvinas
23	1966	Argentina dan Inggris mulai berunding tentang kedaulatan atas Falkland/Malvinas
24	1967	<i>The Falkland Islands Emergency Committee</i> (Komite Darurat Kepulauan Falkland) didirikan oleh pendukung berpengaruh di Inggris untuk melobi Pemerintah Inggris terhadap pelemahan pada masalah kedaulatan. Pada bulan April, Menteri Luar Negeri meyakinkan House of Commons bahwa kepentingan Kepulauan merupakan hal yang terpenting dalam setiap diskusi dengan Argentina.
25	1971	Inggris dan Argentina sepakat agar penduduk Falkland dapat diberikan akses komunikasi oleh pemerintah Argentina
26	1982	Pada tanggal 2 April Argentina menginvasi kepulauan Falkland/Malvinas namun Inggris berhasil mengambil kembali Falkland pada tanggal 14 juni 1982
27	1990	Hubungan diplomatik Argentina – Inggris membaik
28	1999	Argentina – Inggris menandatangani kesepakatan bersama agar kedua negara mengurangi ketegangan
29	2009	Pada 1 Januari 2009 pemerintah Inggris menyepakati sebuah konstitusi baru bagi pemerintah Falkland. Konstitusi baru ini memberikan peningkatan demokrasi lokal dan pemerintahan sendiri, dan memberikan hak penentuan nasib sendiri kepada

		warga Falkland.
--	--	-----------------

SUMBER: FALKLANDS ISLAND GOVERNMENT